

**REVOLUSI SOSIAL ACEH:
POLARISASI POLITIK ULAMA – ULEEBALANG 1945 - 1949**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Agama

Oleh:

SAFARI DAUD
NIM. 97121054

**SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Dalam sejarah kontemporer Indonesia, periode 1945-1949 dikenal dengan masa perjuangan fisik. Dalam terminologi Aceh, pada masa-masa ini pengabdian Aceh terhadap republic dibuktikan dengan dijadikannya Aceh oleh Soekarno sebagai modal bagi perjuangan Indonesia melawan sisa-sisa penjajahan. Selain hal tersebut, dalam masa ini Aceh juga mengalami satu sisi sejarah penting yaitu kontak fisik antara kekuatan ulama melawan kekuasaan uleebalang. Peran ulama sampai tahun 1949 suatu hal yang menarik untuk diteliti, karena paska tahun 1949, kekuatan ulama mulai digoyang kembali yang menyebabkan kekuatan revolusioner ini kembali ke hutan untuk menentang republic. Fokus penelitian ini hanya dari peristiwa “Perang Cumbok” dan berkuasanya ulama. Secara periodic penelitian ini berkisar dari tahun 1945 sampai tahun 1949.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan kekasaan ulama-uleebalang di Aceh, menjelaskan latar belakang terjadinya revolusi sosil dan peran ulama-uleebalang dalam peristiwa tersebut, menjelaskan kekuasaan ulama dalam dekae 1945-1949. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah : mengumpulkan data dan sumber, Verifikasi sumber, dan menganalisa berbagai macam sumber tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun Belanda tidak lama menguasai aceh, politik pasifikasinya dengan membenturkan kelompok stratifikasi social di Aceh telah menimbulkan kecemburuan politik dan gejala dalam masyarakat Aceh. Kedudukan Ulama dan adat berhasil dipangku dalam rangkulan kerajaan. Revolusi social Aceh adalah perebutan kekuasaan dari Uleebalang oleh kaum Ulama dengan memobilisasi massa. Dalam kendali ulama, pemerintahan dibangun atas dasar isu-isu moral dalam mengembangkan daerah moral sebagai basis Republik Indonesia. Ulama telah menunjukkan kesetiaan yang nyata terhadap republic, hal ini terlihat dalam dekade 1945-1949.



DEPARTEMEN AGAMA
IAIN SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB

Jl. Laksda Adisucipto, Telp. (0274) 513949, Yogyakarta 55281

PENGESAHAN

Nomor :

Skripsi dengan judul : Revolusi Sosial Aceh : Radikalisasi Politik Islam 1945-1949

diajukan oleh :

1. Nama : Safari Daud
2. NIM : 97121054
3. Program Sarjana Strata I Jurusan :

telah dimunaqasyahkan pada hari : Senin tanggal 6 Agustus 2001
dengan nilai : B+ dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Agama.

Panitia Ujian Munaqasyah,

Ketua Sidang,

Drs. M. Syakir Ali
NIP. 150178235

Sekretaris Sidang,

Riswinarno, S.S.
NIP. 150294782

Pembimbing/Merangkap Penguji,

Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
NIP. 150201334

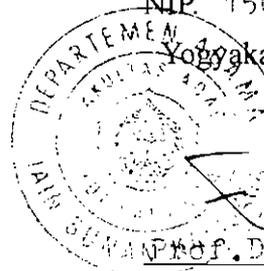
Penguji I,

Drs. H. Maman Malik Sy., M.S.
NIP. 150197351

Penguji II,

Drs. Dudung Abdurrahman, M.Hum.
NIP. 150240122

Dekan,



Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
NIP. 150201334

Prof. Dr. H. Machasin, MA
Dosen Fakultas Adab
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Safari Daud
Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini saya sampaikan bahwa saya telah melaksanakan bimbingan penulisan skripsi oleh saudara Safari Daud, NIM: 97121054 dengan judul **“Revolusi Sosial Aceh: Polarisasi Politik Ulama Uleebalang 1945-1949”**.

Saya berpendapat skripsi tersebut sudah layak diajukan ke sidang munaqasyah. Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, semoga maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Juli 2001

Pembimbing



Prof. Dr. H. Machasin, MA.
NIP. 150201334

MOTTO

اليوم نختم على أفواههم ونكلمنا أيديهم ونشهر أركانهم بما كانوا يكسبون

“ Pada hari ini Kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan” (Al-Qur’an, 36: 65)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan kepada:

Masyarakat Aceh yang sedang menderita,

khhususnya kepada Almarhum

Prof. Dr. H. Tengku Shafwan Idris, MA.

Ulama dan cendekiawan Aceh yang

syahid dalam kekacauan sosial di daerah

tertindas Aceh”.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, semuanya atas limpahan rahmat Allah, penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat dan salam atas Rasul akhir zaman, sinar pencerahannya telah mengantarkan umatnya untuk selalu berkiprah dan terus mengembangkan wacana pencerahan.

Selanjutnya, atas penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dekan Fakultas Adab
3. Bapak Dr. H. Machasin, MA., selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk mendiskusikan, mengoreksi dan meneliti kembali, sehingga skripsi ini dapat terbentuk layaknya karya ilmiah.
4. Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam dan stafnya, serta seluruh dosen Sejarah Peradaban Islam dan karyawan Fakultas Adab.
5. Kedua orang tua, almarhum Abi M. Daud Ali dan almarhumah Mak Zainabun, do`a restu keduanya merupakan obat penawar dalam menyelesaikan studi penulis.
Kakak Djauhari Daud, Muhammad Daud, Abdullah Daud dan Abdul Wahid Daud, adik Mala Dewi Daud dan Bahgia Daud atas do`a mereka yang jauh di sana.
6. Sahabat-sahabat PMII, Ta'mir Masjid IAIN Sunan Kalijaga, Asrama Putra IAIN Sunan Kalijaga. Teman-teman dialog HMI Insan Cita, HMI Marakom, IMM, Kawan-kawan di GMNI, PMKRI dan GMKI.

Mudah-mudahan tulisan ini, layak disebut sebagai karya ilmiah, karena penyusun menyadari banyak kekurangan yang penulis hadapi. Sebagai langkah awal, besar harapan agar skripsi ini dapat berguna, Amin.

Yogyakarta, 22 Juli 2001

Penulis,

Safari Daud

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan dan Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian dan Pendekatan	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II: LATAR BELAKANG PERPECAHAN KEKUATAN	
ULAMA-ULEEBALANG	12
A. Politik Pasifikasi Belanda	12
1. Pengertian Politik Pasifikasi	13
2. Kedudukan Uleebalang dalam Politik Pasifikasi Belanda	15
B. Ulama Sebagai Kekuatan Oposisi	18
1. Ulama dan Reformasi Pendidikan Agama	19
2. Dari Gerakan Pendidikan Menuju Gerakan Politik:	
Lahirnya PUSA	22

C. Ulama dan Uleebalang pada Masa Jepang	26
1. Kedatangan Jepang	26
2. Ulama dan Uleebalang dalam Pemerintahan Jepang....	28
BAB III: REVOLUSI SOSIAL ACEH: PENGAMBILALIHAN	
KEKUASAAN ULEEBALANG.....	35
A. Kemerdekaan RI dan Kondisi Pemerintahan Aceh	35
1. Berita Kemerdekaan RI	35
2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) Aceh	37
3. Respon Ulama Terhadap Kemerdekaan RI	38
B. Pembentukan Pemerintahan Republik di Aceh	40
C. Kedatangan Tentara Sekutu dan Tentara NICA	
di Daerah Aceh	48
D. Peristiwa Cumbok: Awal Perang Saudara	52
BAB IV: PEMERINTAHAN DALAM KENDALI ULAMA	71
A. Pembentukan Majelis Penimbang	71
B. Pelepasan Hak-Hak Uleebalang	73
C. Oposisi Terhadap Ulama	75
D. Respon Pemerintah Pusat	78
E. Jatuhnya Kekuasaan Ulama	82
BAB V: KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
C. Penutup	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah yang panjang Aceh tidak pernah luput dari konflik-konflik yang secara kronologis dapat diurutkan sebagai berikut: Perang melawan Belanda 1873-1914; masa Jepang 1942-1945; revolusi sosial serta pengaruh ulama 1945-1949; DI/TII 1953-1962, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 1978-sekarang. Dalam rentetan waktu tersebut, peristiwa-peristiwa kecil lainnya masih dapat diidentifikasi dalam pilihan-pilihan kecil seperti kasus DOM, kekerasan PEMILU dalam masa Orde Baru.

Konflik-konflik sudah terlalu banyak menimbulkan korban jiwa. Perang Aceh-Belanda yang dimulai sejak 6 April 1873 sampai dengan 1914 telah menimbulkan korban dari pihak Belanda dan Aceh. Di pihak Belanda tewas 37.500 orang dan dari pihak Aceh sebanyak 70.000 orang, atau korban perang kedua belah pihak tewas sebanyak 107.000 orang dan belum lagi ditambah yang luka-luka sebanyak 500.000 orang.¹ Revolusi sosial telah menewaskan 1500 anak negeri Aceh. Peristiwa ini dikenal dengan "Perang Cumbok". Dalam peristiwa ini kaum *uleebalang*² dituduh mengembalikan kekuasaan Belanda.

¹ Lihat, *The Dutch Colonial War in Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi, tahun 1977), hlm. 251.

² *Uleebalang* merupakan kata majemuk dari dua kata *Ulee* dan *Balang*, *Ulee* berarti kepala dan *balang* adalah "Kayu Penguat", kalau diartikan secara etimologis *Uleebalang* adalah Ujung Tombak, A.K. Jakobi mengartikan *Uleebalang* sebagai umara, pengertian ini dijelaskan untuk membedakan dua kepemimpinan antara ulama dan umara, dalam pengertian A.K. Jakobi konflik antar Ulama dan *Uleebalang* adalah konflik Ulama-Umara, untuk lebih jelasnya lihat Teungku A.K. Jakobi, *Aceh Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949 dan Peranan Teuku Hamid Azwar sebagai Pejuang*, (Jakarta: Gramedia, tahun 1998). hlm. xxiv. Gelar *Uleebalang* semula berarti "Kepala Nanggro (negeri)", Masyarakat Aceh juga banyak menyebut kaum bangsawan yang biasanya menyandang gelar Teuku (disingkat T).

Peristiwa Darul Islam tahun 1953-1962, menimbulkan korban 4000 jiwa. Apa yang terjadi di Aceh bukan sekedar tragedi lagi, melainkan itu, suatu sejarah statistik. “*One man death is a tragedy, Million death is a statistic*”, demikian ungkapan Nikita Khrushchev.³

Dalam menjelaskan pergolakan Aceh terutama dalam era 1945-1949, 1953-1962, para peneliti telah memunculkan beberapa teori dalam melihat kasus Aceh. Teori pertama menilai bahwa pergolakan di Aceh lebih disebabkan oleh konflik di antara berbagai kekuatan dalam masyarakat Aceh sendiri. Tafsiran model ini dipengaruhi oleh asumsi bahwa perkembangan politik pada awal kemerdekaan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kehidupan politik masa lalu. Politik tersebut didominasi oleh pertikaian antara ulama dan uleebalang. Wertheim melukiskan perselisihan tersebut dengan ungkapan “apa yang dipelihara oleh tata aristokrasi lama diintegrasikan ke dalam tata sosial baru”. Riak pertikaian ini menjadi rentetan panjang dalam sejarah Aceh.⁴

Teori kedua, Herbert Feith menilai bahwa pergolakan Aceh di samping adanya konflik Ulama-Uleebalang, konflik tingkat elit politik nasional antara partai Masyumi dan PNI juga ikut berperan dalam pergolakan tersebut. Pengecilan peran Masyumi dalam kabinet Ali Sastroamidjojo dianggap sebagai pengecilan peran Islam. Dalam tafsiran ini, pergolakan dilihat sebagai ungkapan aspirasi Islam dan dihubungkan dengan turun naiknya pengaruh Masyumi dalam pemerintahan. Teori ketiga, melihat pergolakan sebagai

sedangkan ulama digelar Tengku (disingkat Tgk.), kemudian istilah Tengku juga merupakan panggilan familiar yang berarti “Saudara” Lihat juga buku Nazaruddin Syamsuddin, *Pemberontakan kaum Republik Kasus Daril Islam Aceh*, (Jakarta: Grafiti tahun 1990), hlm. 2.

³ Al Chaidar, *Aceh Bersimbah Darah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar tahun 1998), hlm. 1.

⁴ Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik*. hlm. 3.

konflik antara daerah dan pusat, sentralisme menjadi isu utama dalam pergolakan ini.⁵

Dari tiga teori di atas, teori pertama menjadi fokus utama dalam penelitian ini, hal ini disebabkan karena motif-motif pertikaian antara ulama dan uleebalang harus dijelaskan secara komprehensif untuk mengetahui problem ke-Aceh-an ini. Revolusi sosial atau ‘Perang Cumbok’ itu sendiri terjadi pada Desember dan Januari 1945-1946, yang dalam sejarah dikenal dengan konflik ulama-uleebalang. Dalam periode 1945-1949 ini, ulama berperan dalam kekuasaan.

Dalam sejarah kontemporer Indonesia, periode 1945-1949 dikenal dengan masa perjuangan fisik. Dalam terminologi Aceh, pada masa-masa ini pengabdian Aceh terhadap republik dibuktikan dengan dijadikannya Aceh oleh Soekarno sebagai modal bagi perjuangan Indonesia melawan sisa-sisa penjajah. Selain hal tersebut, dalam masa ini Aceh juga mengalami satu sisi sejarah penting yaitu kontak fisik antara kekuatan ulama melawan kekuasaan uleebalang. Peran ulama sampai tahun 1949 suatu hal yang menarik untuk diteliti, karena paska tahun 1949, kekuatan ulama mulai digoyang kembali yang menyebabkan kekuatan revolusioner ini kembali ke hutan untuk menentang republik. Fokus penelitian ini hanya dari peristiwa “Perang Cumbok” dan berkuasanya ulama. Secara periodik penelitian ini berkisar dari tahun 1945 sampai tahun 1949.

⁵ *Ibid*, hlm. 4.

dan mempunyai kemahiran dalam bidang pemerintahan, mendapat tantangan dari ulama.

Dalam penelusuran faktor-faktor tersebut, revolusi sosial sebagai polarisasi politik ulama-uleebalang dapat diidentifikasi dalam beberapa masalah. *Pertama*, latar belakang terjadinya revolusi sosial Aceh. *Kedua*, revolusi sosial dan perebutan kekuasaan antara ulama dan uleebalang. *Keiga*, Aceh dalam kekuasaan para ulama pada masa 1945 sampai dengan 1949.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah persoalan revolusi sosial di Aceh sebagai polarisasi politik ulama-uleebalang dengan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya revolusi sosial di Aceh ?
2. Bagaimana terjadinya perebutan kekuasaan antara ulama dan uleebalang di Aceh ?
3. Bagaimana ulama meraih kekuasaan dan berkuasa dalam dekade 1945-1949 ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana tentang kekuasaan ulama-uleebalang di Aceh.
2. Menjelaskan latar belakang terjadinya revolusi sosial dan peran ulama-uleebalang dalam peristiwa tersebut.
3. Menjelaskan kekuasaan ulama dalam dekade 1945-1949.

Kegunaan penelitian ini diharapkan:

1. Memberikan sumbangan untuk khazanah informasi tentang sejarah Aceh khususnya tentang revolusi sosial Aceh dan polarisasi politik ulama-uleebalang periode 1945-1949.
2. Sebagai Sumbangan pemikiran dalam penyelesaian rentetan konflik di Aceh dewasa ini.

E. Tinjauan Pustaka

Tidak mengherankan kalau kajian mengenai Aceh banyak diminati para ilmuwan. Para ilmuwan seperti Cornelis van Dijk, J. Kreemer, Audrey R. Kahin, sangat berminat dalam masalah Aceh. Audrey R. Kahin secara jelas menyebutkan bagaimana peran uleebalang dalam birokrasi Belanda, dalam kajian ini Kahin menerangkan peran *zelfbestuurder* dari *Landschan* lembaga untuk uleebalang dan pemberian gaji bagi mereka.⁷

Kepustakaan lainnya, Prof. Ibrahim Alfian seorang sejarawan Aceh melukiskan semangat perang Aceh (*Prang Kaphe*) dalam bukunya *Perang di Jalan Allah, Aceh 1873-1912*. Semangat perang ini dalam penjelasan Alfian lebih disebabkan oleh mistifikasi hikayat Perang Sabil.⁸

Teori-teori pergolakan Aceh 1953-1962 oleh Nazaruddin Sjamsuddin dijelaskan secara terperinci dalam bukunya "*Pemberontakan Kaum Republik, Kasus Darul Islam Aceh*". Teori konflik ulama-uleebalang sebagai faktor

⁷ Audrey R. Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, (Jakarta: Grafiti 1990).

⁸ T. Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah, Aceh 1873-1912*, (Yogyakarta: Disertasi UGM 1981), hlm. 83-180.

penyebab pemberontakan bisa dijadikan acuan dalam langkah penelitian selanjutnya. Buku ini inemfokuskan pada peristiwa DI/TII Aceh, di dalamnya sedikit menggambarkan tentang revolusi sosial, namun peran-peran ulama-uleebalang dalam pergolakan ini menjadi bahasan dalam buku ini. Pendekatan sosial-politik yang dipakai penulis dapat dijadikan sampel penelitian selanjutnya.

Cornelis van Dijk dalam bukunya “*Rebellion under the Banner of Islam (The Darul Islam in Indonesia)*” yang diterjemahkan menjadi *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*,⁹ menjelaskan motif-motif terjadinya revolusi. Dalam anggapannya, revolusi sosial Aceh tidak bisa dilihat hanya dalam kapasitas konflik adat dan agama, tetapi motif-motif politik, sosial dan ekonomi harus dicermati secara utuh. Di samping itu juga motif ideologis sebagai alat untuk mencapai tujuan gerakan. Motif-motif tersebut saling terkait satu dengan lainnya. Buku ini merupakan kepustakaan mengenai Aceh yang tak dapat ditinggalkan.

Secara khusus buku biografi yang ditulis oleh Tengku A.K. Jakobi, *Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949 dan Peran Teuku Hamid Azwar Sebagai Pejuang*, memiliki nuansa berbeda dibanding dengan buku biografi lainnya tentang kepahlawanan tokoh perjuangan. Buku ini di samping menceritakan silsilah keluarga, pengalaman masa kecil, perjuangan awal kemerdekaan, dan kiprah di dunia pengusaha, sarat dengan sejarah lokal tentunya juga dalam tinjauan perspektif lokal.

⁹ Dijk, *Darul Islam*. hlm. 259.

bagaimana kemerosotan Uleebalang, perlu dianalisis dalam suatu pendekatan politik.

Berkaitan dengan hal di atas, penulis akan beberapa langkah:

1. Penulis mengumpulkan data dan sumber sebagai langkah pertama. dilangsungkan dengan metode penggunaan bahan-bahan dokumen-dokumen yang ada, walaupun penulis kesulitan dalam menemukan sumber-sumber primer namun akan meneliti data dari dokumen-dokumen, koran-koran, majalah, dan siaran pemerintah pada masa tersebut.
2. Penulis melakukan verifikasi sumber, dokumen-dokumen nasional tentang respon terhadap revolusi sosial di Aceh, perbandingan koran daerah dan lokal, sumber-sumber sejarah lokal dan perspektif lokal. Kemudian penulis juga membandingkan dengan pengakuan penulisan sejarah lainnya seperti tulisan bekas Gubernur Sumatera Timur S.M. Amin dan penulis-penulis lainnya. Dalam hal ini penulis melakukan kritik sumber baik intern maupun ekstern.
3. Langkah ketiga, penulis menganalisa berbagai macam sumber tersebut. Bagaimana perjalanan kekuasaan Ulama-Uleebalang dari sumber-sumber yang didapatkan. Bagaimana kedua unsur tersebut membagi kekuasaannya akan disintesaikan berdasarkan fakta-fakta yang menyebabkan terjadinya peristiwa revolusi sosial Aceh dalam sumber tersebut. Interpretasi ini nantinya akan memunculkan suatu kesimpulan tentang peristiwa revolusi sosial itu.

4. Penulis dalam langkah keempat, menjelaskan secara kronologis paparan penulisan sejarah revolusi sosial Aceh sebagai polarisasi politik ulama uleebalang 1945-1949 sebagai langkah dalam penulisan sejarah (historiografi).

G. Sistematika Pembahasan

Penyajian dalam bentuk skripsi ini mempunyai lima bab, bab pertama adalah pendahuluan, di dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah penelitian, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan pendekatan sistematika pembahasan.

Hasil penulisan selanjutnya disajikan dalam tiga bab sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Pada bab kedua dijelaskan latar belakang terjadinya revolusi sosial di Aceh. Bab ini menjelaskan sejarah perjalanan kekuasaan antara Ulama-Uleebalang pada masa kolonialisme Belanda, politik pasifikasi Belanda terhadap rakyat Aceh, model-model politik Jepang dalam memandang dua kekuatan ini, dan bagaimana fungsi dua kekuatan tersebut pada kolonialisme Belanda.

Bab ketiga difokuskan pada peristiwa revolusi sosial itu sendiri. Dalam bab ini akan dibicarakan bagaimana berita kemerdekaan Republik Indonesia dan status pemerintahan Aceh, kemudian dijelaskan juga tentang “*Perang Cumbok*” yang merupakan perlawanan terhadap Uleebalang dan bagaimana cara Ulama mengambil alih kekuasaan Uleebalang.

Bab keempat difokuskan pada pembahasan kekuasaan Ulama, di sini akan dijelaskan bagaimana peran Ulama dalam revolusi sosial di Aceh.

BAB II

LATAR BELAKANG PERPECAHAN KEKUATAN ULAMA-ULEBALANG

A. Politik Pasifikasi Belanda

Dalam menghadapi dan membendung gerakan politik yang menentang kekuasaan kolonial di Aceh, pemerintah Belanda memainkan paran adat lewat kekuatan lembaga adat (pemerintahan uleebalang) sebagai perantara dan alatnya. Model pendekatan ini jelas dapat terlihat bila kita telesuri laporan Gubernur Aceh pada waktu itu, Van Aken (1933-1936).¹ Lebih jelasnya laporan tersebut sebagai berikut:

"...Selama kita dapat menggunakan pemerintahan adat dengan sebaik-baiknya, selama itu pula kita dapat mengekang gerakan-gerakan politik".²

Sekian puluh tahun perang Aceh (1873-1912), yang telah menghancurkan tidak hanya kekuatan Aceh tetapi juga kekuatan kolonial, dalam tindakan selanjutnya Belanda membuat garis kebijakan yang lebih hati-hati dan memakai politik *divide et impera* untuk menundukkan kekuatan perang di Aceh.

Selama peperangan di Aceh telah menghasilkan 11.000 orang Aceh terbunuh oleh Belanda pada tahun 1903, dan 6.000 orang pada tahun 1908. menjelang tahun 1913, setelah jatuhnya korban sebanyak 3.000 orang, dua sisa pusat perlawanan Aceh telah dapat dipatahkan Belanda. Yaitu pusat-pusat

¹ "Politiek Positional. Verslag betreffende het gewest Atjeh onder Hoorigheden gedurende het jaar 1993", *Mails No. 374 geh 34*, (terjemahan Aboe Bakar Aceh, editor T. Ibrahim Alfian).

² Ibid.

perlawanan yang dipimpin oleh Tengku-Tengku di Tiro daerah Pidie dan Tengku Mata Le di Keumerutoe.³

Tragedi tersebut tidak menyebabkan surutnya semangat perang rakyat Aceh, secara berkala orang-orang yang berkumpul dengan ulama menggalang kekuatan dengan syair-syair *perang sabil*. Hikayat *perang sabil* yang membangkitkan semangat berjuang di jalan Allah jika mati syahid, menjadi obat pembangkit semangat untuk berperang.⁴

Belanda dalam menyelesaikan persoalan ini dengan memakai dua cara. Pertama, memecahkan *Atjeh Probleem* dengan sistem politik mendukung uleebalang. Kedua, memakai senjata untuk memerangi kekuatan-kekuatan “sakit jiwa” yang dipelopori oleh ulama dengan memakai kekuatan senjata. Belanda memakai politik pasifikasi untuk menghadapi dua kekuatan di atas, sejak inilah polarisasi kekuatan ulama-uleebalang secara historis dapat ditelusuri.

1. Pengertian Politik Pasifikasi

Pasifikasi secara etimologis adalah “hutang-hutang yang harus dibayar”. Politik pasifikasi adalah lanjutan gagasan yang dikemukakan oleh C. Snouek Hurgronje yaitu suatu politik yang menunjukkan sikap damai melalui berbagai usaha yang mengacu ke arah akomodasi dan berusaha menjauhi sikap konfrontasi.⁵

³Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983), hal 32

⁴Ibid, hal. 35.

⁵ Di Indonesia politik yang sama diterapkan juga oleh Belanda pada akhir abad ke-19, politik ini lebih dikenal dengan “politik etis”, yaitu suatu upaya keras memberikan kontribusi

Dalam rangka politik pasifikasi ini, Pemerintah Hindia Belanda melakukan beberapa usaha. Di antaranya dengan jalan meningkatkan kecerdasan rakyat, terutama anak-anak uleebalang yang bersedia menghentikan perlawanan dan menyerahkan diri kepada Belanda dengan memberikan pendidikan barat. Dengan politik ini pihak Belanda mulai memperlihatkan sikap lunak kepada masyarakat Aceh. Untuk mengamankan Aceh, mereka tidak lagi bertindak hanya dengan mengandalkan kekerasan, tetapi juga dengan usaha-usaha lain yang dapat menimbulkan simpati rakyat.

Pemerintah Hindia Belanda beranggapan bahwa jika ekonomi daerah dan ekonomi rakyat maju, maka penghidupan rakyat akan menjadi lebih baik dan lebih makmur, sehingga ketentraman dan ketertiban daerah akan lebih terjamin. Dengan demikian diharapkan rakyat Aceh tidak lagi memusuhi atau memerangi Belanda dan rakyat akan dapat melupakan penderitaan yang mereka alami akibat berperang dengan Belanda dalam waktu yang terlalu lama.⁶

Peristiwa ke arah perbaikan ekonomi dalam rangka politik pasifikasi di Aceh, sebenarnya sudah dimulai pada masa Gubernur sipil dan militer Van Heutsz (1898-1904), berbarengan dengan politik keras yang dilaksanakannya,

positif bagi tercapainya kesejahteraan penduduk pribumi dengan berbagai cara: irigasi, pendidikan, dorongan untuk fasilitas kredit rakyat, dan penyuluhan dalam bidang pertanian. Mengenai lamanya "politik etis" ini terdapat beberapa pendapat: ada yang menyatakan berakhir sampai tahun 1913, ada yang berpendapat sampai tahun 1942, dan ada pula yang berpendapat bahwa, tahun 1920-lah masa berakhirnya politik etis. Untuk lebih jelasnya mengenai politik etis ini lihat W.F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, tahun 1999), hal. 70. dan lihat juga H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hal.101.

⁶ Rusdi Sufi, "Pasifikasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Aceh", *Makalah Seminar Sejarah Nasional II di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), hal. 2.

tetapi intensifikasinya baru dijalankan di bawah pemerintahan Gubernur H.N.A. Swart (1908-1918). Swart, dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukannya berhasil meletakkan dasar bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi di Aceh. Politik “keras” yang dianut oleh penguasa-penguasa sebelumnya (Van Heutsz, Van der Wijk dan Van Daalen), mulai dikesampingkan. Ia berusaha untuk mendekati rakyat dengan memperlihatkan saling damai dan bijaksana. Berkat uang dan tindakan-tindakan yang bersahabat dalam bentuk pemberian hadiah-hadiah, tunjangan-tunjangan dan bintang-bintang jasa kepada sejumlah uleebalang, Swart berhasil meyakinkan dan mengikut sertakan mereka untuk bekerja sama dalam membangun ekonomi di Aceh.⁷

2. Kedudukan Uleebalang Dalam Politik Pasifikasi Belanda

Kaum uleebalang menjadi dasar kebijaksanaan kolonial Belanda di Aceh, analisis Gubernur Goedkart tentang situasi tahun 1928 menggambarkan pentingnya Belanda mendekati uleebalang. Lebih lebih jelasnya Goedkart menyatakan:

“Untuk memberi kesan yang baik, pertama-tama yang perlu kita ingat ialah bahwa kekuatan kita di Aceh selain dari kekuatan senjata, terutama sekali tergantung kepada para *uleebalang*. Melalui mereka dan dengan merekalah kita dapat mengusai rakyat itu. Tanpa mereka kita akhirnya tidak akan tercapai apa-apa di Aceh”.⁸

Tanggapan masyarakat Aceh terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan politik pasifikasi pemerintahan Belanda berbeda-beda, para pemimpin adat

⁷ Ibid, hal. 3

⁸ Morris, *Aceh: Revolusi Sosial dan Pandangan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hal. 90-91.

(kelompok) uleebalang ada yang memusuhi kehendak Belanda, disamping juga ada yang terus melakukan perlawanan. Para pemimpin agama (ulama) ada yang berdiam diri saja. Ada pula yang mengikuti uleebalang belajar pada pemerintahan Belanda dan juga ada yang terus mengangkat senjata.⁹

Namun ketika politik pasifikasi dilaksanakan secara intensif, sebagian besar uleebalang dari sekitar 100 orang, telah berdamai dengan Belanda dan bersedia menanda tangani perjanjian singkat yang antara lain berisi menyatakan tunduk serta mengakui kedaulatan Belanda atas wilayah mereka. Para uleebalang yang telah tunduk, dilibatkan bekerja pada struktur birokrasi Belanda dengan diangkat secara resmi sebagai *Zelfbestuurder* dari *Landschu* atau kenegerian masing-masing dan diberi gaji oleh pemerintah Belanda.¹⁰

Terdapat kontradiksi di dalam persepsi Belanda mengenai uleebalang; persepsi ini juga mengakibatkan adanya kontradiksi dalam kebijaksanaan kolonial. Di satu pihak, uleebalang dianggap sebagai penguasa adat. Sebagaimana diketahui mereka adalah mewakili kesinambungan tradisi Aceh yang sesungguhnya, bertentangan dengan aspirasi kaum ulama, Belanda lebih condong memulihkan keunggulan tradisional uleebalang. Pada satu sisi Belanda memperkuat kekuasaan uleebalang dengan memberikan jaminan masa jabatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Modernisasi birokrasi diperkenalkan kepada uleebalang dengan pembagian kekuasaan yang jelas

⁹ T. Ibrahim Alfian. "Sejarah Perang di Aceh" dalam Sartono Kartodirdjo (ed) *Sejarah Perlawanan-Perlawanan Terhadap Kolonialisme*. (Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1973). hal. 26.

¹⁰ Sufi, *Pasifikasi dan Pertumbuhan Ekonomi*. hal.3.

sesuai wilayah masing-masing tanpa harus ada persengketaan mengenai hak wilayah masing-masing.¹¹

Penguasa Belanda membantu memperkuat penguasa uleebalang ini dengan memberikan jaminan masa jabatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pada sisi lain, kebijaksanaan kolonial mengubah kedudukan ekonominya, mencabut cengkraman kekuasaan mereka terhadap arus barang yang keluar-masuk wilayah mereka. perdagangan dan pengumpulan bea cukai atas barang-barang demi kepentingan pemerintah, tetapi mereka mendapat gaji tetap dari pemerintah. Uleebalang tidak bisa lagi mendapatkan kekayaan dengan jalan menguasai mekanisme dan pemasaran tanaman niaga (*cash crops*). Akibatnya uleebalang terpaksa mencari-cari dalam wilayahnya sumber-sumber pendapatan baru untuk menambah gaji mereka. Sumber baru yang terpenting adalah pemilikan dan penguasaan tanah-tanah persawahan. Akibatnya, pemilikan tanah itu semakin terpusat di tangan para uleebalang, terutama di daerah lumbung padi Pidie, dan perkembangan ini memperburuk hubungan antara kepala daera (uleebalang) dengan kaum tani.¹²

Meskipun dalam beberapa hal politik pasifikasi ini dapat dikatakan berhasil, tetapi pihak Belanda tidak pernah mengalami masa damai yang sesungguhnya di daerah Aceh. Hal ini dapat dilihat dalam pembaruan pola gerakan kaum oposisi yang dipimpin oleh ulama.

¹¹ Morris, *Aceh: Revolusi Sosial*, hal. 91.

¹² *Ibid*, hal. 93.

B. Ulama Sebagai Kekuatan Oposisi

Kejatuhan kesultanan Aceh dan tunduknya kekuatan uleebalang terhadap kolonialisme Belanda, membuat tampilnya ulama sebagai pemegang kendali panji-panji perlawanan terhadap kekuasaan Belanda.

Kegagalan para uleebalang dalam mempertahankan wilayahnya dari gempuran susulan dari pihak kolonial, sehingga menjadi hubungan antara ulama dan uleebalang retak dan renggang.¹³ Di samping problem tersebut, kedudukan uleebalang sebagai administrator pada zaman kolonial menyebabkan mereka menjadi sasaran kebencian rakyat. Akan tetapi jauh lebih penting dalam menentukan sikap terhadap uleebalang, adalah kenyataan sistem peradilan yang seragam itu di seluruh daerah bersandar pada keterkaitan yang dipaksakan antara yang dianggap Belanda sebagai suatu kesatuan simbolis adat yang berdiri sendiri dan pengembangan uleebalang sebagai “Penguasa Adat”. Keterkaitan yang dipaksakan itu menghasilkan relief yang tegas dari satu konflik yang sebelumnya dikatakan oleh orang-orang Aceh sebagai tidak memiliki arti, yaitu suatu konflik antara adat dan hukum Islam.¹⁴

Persoalan diatas bagi ulama bertambah ruwet ketika harus menghadapi modernisasi yang dicetus oleh Belanda di era 1920-an dengan sistem pendidikan barat, dan proses modernisasi pendidikan ini hanya dinikmati oleh anak-anak uleebalang. Taufik Abdullah menggambarkan keterkejutan ulama dalam menghadapi perubahan-perubahan barat yang menyebabkan

¹³ Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: harian Waspada, 1985), hal. 25-26.

¹⁴ Kahim, *Pergolakan Daerah Paka. Awal Kemerdekaan*, (Jakarta: Grafiti, 1989), hal. 89.

pengembangan sumber daya ulama harus dicari jalan keluar untuk mencerdaskan kaumnya.¹⁵ Doktrin bahwa mengikuti “program-program kekafiran, berarti dia adalah kafir”, menyebabkan ulama harus merubah pola gerakan dari pola bersenjata ke pola memperbaiki pendidikan.¹⁶

1. Ulama dan Reformasi Pendidikan Agama

Para ulama yang muncul sebagai pemimpin perubahan, dapat dikenali sebagai tokoh-tokoh terkemuka setempat, gerakan pembaruan Islam yang tersebar di seluruh dunia Islam pada awal abad ke-20. Islam reformis di Aceh membentuk organisasi PUSA (Persatuan Ulama-Ulama Seluruh Aceh) pada tahun 1939, yang mewakili puncak usaha menyegarkan kembali pendidikan agama. Pada akhir tahun 1920-an, sekolah-sekolah baru yang disebut dengan madrasah didirikan, model pendidikan ini memadukan pendidikan agama yang bersifat tradisional.¹⁷

¹⁵ Taufik Abdullah, (ed). *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986). hal. 158-170.

¹⁶ Fenomena ini merupakan fenomena sosiologis di Indonesia, fenomena sosiologis ini hanya dapat dijelaskan bila dihubungkan dengan cerita ulama yang mencintai kemerdekaan serta kebencian mereka terhadap otoritas kolonial dan gaya hidupnya. Lihat Ahmad Syafii Ma'arif, *Studi dan Masalah Kenegaraan. Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hal. 54.

¹⁷ Kahin, *Pergolakan Daerah*. hal. 95. Ahmad Syafii Ma'arif menggambarkan gerakan modernis Islam abad ke-20 telah memunculkan organisasi Muhammadiyah, Persis (Persatuan Islam), Al-Irsyad dan Serikat Islam. Lihat Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan...*, hal. 69. Apakah reformasi pendidikan di Aceh mempunyai keterkaitan dengan gerakan organisasi tersebut? Pergerakan Nasional yang pada mulanya muncul di Jawa tahun 1908 dalam waktu relatif singkat telah bergema pula di Aceh. Serikat Islam (SI) merupakan organisasi kebangsaan yang pertama didirikan di Aceh. Pada mulanya SI muncul di Tapak Tuan (Aceh Selatan) tahun 1916, kemudian mendapat pengikut di tempat-tempat lain di Aceh, seperti Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur dan lain-lain. Muhammadiyah pada mulanya masuk ke Kutaraja pada tahun 1923, dibawa oleh bekas sekretaris Muhammadiyah ranting Betawi, S-Djaja Soekarta, yang pindah ke Aceh dan bekerja pada *Atjeh Trans*. Tahun 1927, dengan bimbingan A.R. Sutan utusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berdirilah cabang Muhammadiyah Kutaraja dibawah pimpinan R.O. Armadinata, dokter gigi sebagai *Consul Hoofdbestuur* Muhammadiyah yang pertama untuk daerah Aceh diangkat T. Muhammad Hasan, calon uleebalang Geulumpang Payong yang pernah menangkap ketua

Dalam reformasi pendidikan, sejumlah *madrasah* bermunculan untuk menggantikan *dayah* (pesantren) pada tahun 1928-1929: delapan tahun kemudian terdapat sekurang-kurangnya 98 madrasah di daerah itu. Untuk menyebarkan ajaran agama, para ulama berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya untuk memberikan tablig kepada pendengar yang lebih luas. Banyak diantara mereka yang mengajar ke luar kampung mereka. Sementara para ulama menyebarkan agama melalui dakwah yang membangkitkan harapan rakyat akan kemajuan, anak-anak muda memasuki sekolah mereka dengan penuh minat. Oleh karena itu, masa ini pada umumnya dikenal dengan “zaman kesadaran” atau “zaman kemajuan”.¹⁸

Tengku Daud Beureueh mengamati langkah-langkah kepada pengenalan huruf latin, hal ini diharapkan agar orang-orang Aceh tidak telalu benci terhadap huruf latin, pendidikan umum diadopsi agar kecurigaan uleebalang dan Belanda terhindari. Terobosan yang ditempuh adalah dengan menerjemahkan semua pelajaran agama dan umum ke dalam bahasa Arab

cabang Muhammadiyah tahun 1927-1929 Muhammadiyah telah memiliki cabang di Sigli, Meureudu Lhok Seumawe, Langsa, Kuala Simpang dan Aceh Tengah. Untuk lebih jelasnya lihat Muhammad Ibrahim, *Pemerintahan Adat dan Pergerakan Nasional di Aceh*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, (Jakarta: 1985) hal. 3-6. dalam Van Dijk, Muhammadiyah Aceh sebagian berfungsi sebagai organisasi politik dan bukan semata-mata sebagai organisasi pendidikan dan keagamaan. Tetapi, organisasi ini tidak menarik bagi pemimpin-pemimpin Islam Aceh dan para pengikut mereka, hal ini disebabkan oleh karena tidak mengakarnya Muhammadiyah dalam masyarakat Aceh, dia hanya merupakan gejala gerakan kota, para anggotanya sebagian besar dari luar daerah, atau orang Aceh dengan pendidikan formal yang telah tercerabut dari lingkungan tradisionalnya. Lihat Van Dijk, *Darul Islam. Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1983), hal. 257.

¹⁸ Ismail Jakob, “Pergerakan di Atjeh dalam 10 taheon”, *Sinar*, 7 (15 April 1940), hal. 125. Lihat juga Oesman Ralybi, “Masyarakat Atjeh Baroe”, *Penjoeloeh*, Oktober 1941.

sebagai rujukan, sebab apresiasi masyarakat terhadap bahasa Arab sangat ideologis.¹⁹

Langkah-langkah reformasi pendidikan ini dilakukan oleh para ulama untuk menjembatani kesenjangan pendidikan antara pendidikan model barat yang dibawa oleh Belanda (Westernisasi) dan keterbelakangan generasi muda Aceh untuk memahami dunia modern. Konteks pemikiran untuk memadukan kepentingan dunia dan akhirat, merupakan juga latar belakang diadakannya reformasi pendidikan.

Upaya aplikatif kombinasi ilmu akhirat dan ilmu dunia ini memunculkan sistem pendidikan madrasah, yang juga terdapat di Sumatera Barat, yaitu sekolah agama yang menggabungkan sistem pendidikan dayah dengan metode yang dipakai sekolah menengah pemerintah yang mempunyai buku pegangan (textbook) dengan papan tulis, meja dan kursi.²⁰

Upaya-upaya di atas secara positif telah membuahkan hasil munculnya madrasah-madrasah dan cabang-cabangnya, seperti di Aceh Utara, Pidie, Takengon. Akan tetapi perbedaan pendapat antar ulama sendiri terjadi dalam pembahasan silabi madrasah, muncul beberapa nada sumbang dalam pemikiran yang negatif dari ulama-ulama dayah tradisional, terutama tantangan dari Tengku M. Amin Jumpah, Pidie, kelompok ini menolak belajar mengajar dan tidak setuju dengan adopsi terhadap mata pelajaran sekunder (umum). Langkah

¹⁹ Lihat A. Hasjmy, "*Pendidikan Islam di Aceh dalam Perjalanan Sejarah*". (Banda Aceh: Sinar Darussalam, 1975), No. 63

²⁰ Ismuha, *Protes Perkembangan Pendidikan di Aceh*, makalah (Banda Aceh: 1970), hal. 4

penasehat dijabat oleh Tengku Ahmad Hasballah Indrapuri dan Tengku M. Amin (Tengku di Yon).²³

Gerakan politik ulama semakin terlihat ketika digelarnya kongres pertama PUSA pada April 1940 di kota Blang Asam Sigli. Dalam kongres ini terjadi mobilisasi massa oleh para ulama, ribuan massa datang dari segala penjuru Aceh, bahkan dari luar Aceh. Melihat kenyataan ini Belanda merasa perlu mengambil tindakan terhadap gejala politik para ulama. Pemerintah Belanda sebelumnya tidak menaruh perhatian atas kelahiran PUSA, tetapi mulai menangkap gejala suatu gejala luar biasa ketika melihat adanya dukungan massa saat itu. PUSA yang selama ini disangka hanya sekedar perkumpulan para ulama ternyata sebuah organisasi massa (ormas) yang memiliki pengikut cukup banyak. Kecurigaan Belanda beralasan karena sebelumnya banyak organisasi politik yang berlandaskan agama dirasakan sangat mengganggu aktivitas politik pemerintahan kolonial. Apalagi kedudukan Belanda beberapa waktu saat ini dalam posisi sulit dan lemah dikarenakan sebuah berita yang mengejutkan bahwa negeri Belanda bersama Belgia dan Perancis ditaklukkan Jerman pada 10 Mei 1940.²⁴

Kongres PUSA di Blang Kuta Asam Sigli mempunyai tiga aspek politik yang patut dicatat. Pertama; kongres menetapkan seorang tokoh ulama Tengku M. Daud Beureueh sebagai Ketua PUSA secara resmi, Tengku Daud Beureueh seorang tokoh kharismatik dan dikenal sebagai pelopor gerakan pembaruan sistem pendidikan Islam melalui institusi *madrasah* dan orator tangguh saat

²³ Ibid, hal. 8.

²⁴ *Ramadhan KH dan Hamid Jabbar, Syamaun Gaharu, Cuplikan Perjuangan Daerah Atokal, Autobiografi*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 23.

mengobarkan api Islam dan sanggup memberikan sentuhan yang berarti bagi organisasi PUSA. Kedua, kongres merekomendasikan pembentukan divisi kepemudaan yang dinamakan Pemda PUSA dibawah komando Tengku Amir Husein al-Mujahid dari Idi, Aceh Timur, yang dengan berani dan tegas mengajukan dirinya sendiri sebagai ketua, dan beliau dibantu Abubakar Adamy sebagai wakilnya. Ketiga, kongres menetapkan untuk membuat penerbitan guna menyuarakan program-program PUSA, di samping itu untuk mengimbangi propaganda pers (jurnal) mingguan Belanda *Atjeh Nieuwsblad*. Dan setelah beredarlah terbitan periodik yang di distribusikan pertama sekali pada Nopember 1940 dengan mengambil bentuk majalah mingguan dengan Tengku Ismail Jakob sebagai pemimpin redaksi. Sebagai kekuatan Islam, PUSA juga memutuskan untuk bergabung dengan Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI) yang sudah berdiri sejak 21 September 1937.²⁵

Kentalnya nasionalisme Aceh dalam diri PUSA membuat Belanda mencari taktik untuk memecahkan konsentrasi organisasi ini. Para penguasa Belanda pastilah melihat adanya bahaya dalam perkembangan organisasi ini. Oleh sebab itu, pendekatan *divide et impera* yang klasik itu kembali dipakai.

Belanda memanfaatkan kembali isu akan berkuasanya kaum ulama dengan memanfaatkan ketidak senangan para uleebalang terhadap Sultan.²⁶

²⁵ Ismuha, "*Lahirnya Persatuan Ulama Seluruh Aceh 30 tahun yang lalu*", Sinas Darussalam (Banda Aceh: Juli 1969), hal. 34.

²⁶ Perlu diketahui bahwa gerakan reformasi pendidikan telah membawa kepada maraknya sekolah-sekolah (*madrasah*) baru, ini membawa persaingan antara uleebalang sendiri untuk membangun *naggro* (negeri) kekuasaannya dengan sistem pendidikan baru. dalam hal ini, uleebalang perlu melakukan kerja sama dengan ulama-ulama terkenal untuk mengajar di daerah mereka. Perkembangan ini mendorong tumbuhnya saling pengertian antara ulama dan uleebalang dalam menentang Belanda apabila ada kesempatan. Rekonsiliasi ini membuka jalan bagi kerja sama selanjutnya diantara dua kekuatan tersebut. Oleh sebab itu, ketika kaum

Pada akhir tahun 1930-an secara licik Belanda mengeluarkan gagasan bagi kemungkinan untuk mendirikan kembali Kesultanan Aceh. Secara kebetulan langkah Belanda ini diambil bersamaan dengan pembentukan PUSA pada tahun 1939. kebanyakan uleebalang yang menentang kembalinya Sultan terutama di Pidie, mengaitkan organisasi baru ini dengan gagasan Belanda untuk mendirikan kembali Kesultanan, meskipun sesungguhnya banyak pemimpin puncak PUSA sendiri tidak menyukai gagasan tersebut. Mereka menuduh para uleebalang yang dekat dengan PUSA memiliki kepentingan pribadi dalam usaha membangun kembali Kesultanan itu. Seperti sebuah ramalan mereka menyindir bahwa PUSA sebenarnya merupakan kepanjangan dari “Pembunuhan Uleebalang Seluruh Aceh”. Namun kenyataannya ialah bahwa sampai Belanda takluk kepada Jepang pada tahun 1942, mereka tidak pernah menghidupkan kembali Kesultanan itu.

Kendatipun berhasil menghidupkan kembali antagonisme antara uleebalang-uleebalang dengan kaum ulama, Belanda tidak dapat mencegah timbulnya suatu pemberontakan yang meluas terhadap mereka pada akhir Februari 1942. Beberapa uleebalang, yang dipimpin oleh Teuku Nyak Arif, seorang uleebalang yang populer dari daerah Kutaraja, dan Teuku Muhammad Polim, putra seorang pahlawan terkenal dalam Perang Aceh, berhasil mendesak uleebalang-uleebalang untuk bekerja sama dengan para ulama dalam Belanda. Tentu saja uleebalang penganut garis keras tidak mempunyai alternatif lain

reformis membentuk PUSA, banyak uleebalang mendukung mereka meskipun kaum bangsawan beraliran keras menentangnya. PUSA juga mendapat perlawanan dari kaum tradisional dipimpin oleh berbagai ulama, yang paling terkenal diantara mereka adalah Tengku Hasan Krueng Kale. Untuk lebih jelasnya lihat Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik*, hal. 21.

Sejak Jepang mendarat di Jepang, merka bersama dengan rakyat terutama barisan "F", terus melakukan serangan terhadap Belanda. Jepang melancarkan serangan terhadap pasukan Belanda yang berusaha untuk mempertahankan lapangan udara Lhok Nga, lapangan yang sangat vital kedudukannya. Pasukan Belanda terpaksa mundur melalui pantai barat guna mengabungkan diri dengan pasukan-pasukan yang masih berada di pantai barat dan pantai selatan dengan tujuan untuk mencapai daerah pertahanan di Lawe Butar. Dalam pengunduran dari pengejaran tentara Jepang itu, pasukan Belanda tersebut dihadang oleh anggota barisan "F" di sepanjang pantai barat Aceh. Karena itu terjadi beberapa kali konflik senjata antara pasukan Belanda tersebut dengan pejuang di pantai barat Aceh yaitu yang berlangsung dari tanggal 13 hingga 18 Maret 1942.³⁰

Selain dari mereka yang mengungsi ke arah pantai barat dan selatan Aceh, sebagian juga yang masih berada di Aceh Besar di Pidie melarikan diri ke Tangse dan Geumpang (juga wilayah Pidie) yang merupakan benteng pertahanan Belanda kedua setelah Takengon (Aceh Tengah), tetapi tentara Belanda ini terus menerus dikejar oleh tentara Jepang. Pasukan Jepang berada di daerah ini pada tanggal 19 Maret 1942, kemudian menggempur pasukan Belanda yang akhirnya mereka menyerah pada hari itu juga. Rencana Belanda yaitu ingin mempertahankan Lhok Nga dan Tangse Geumpang yang dicadangkan sebagai basis pertahanan kedua, namun ternyata kini telah mengalami kegagalan, sedangkan sisanya, terutama pasukan Belanda yang

³⁰ Jamil, *Riwayat barisan "F"*, hal. 56-57.

Dalam penempatan jabatan pemerintahan-pemerintahan Jepang tampaknya masih memakai tradisi Belanda, yaitu dengan mengangkat kaum elit bangsawan atau uleebalang dalam mengisi jabatan-jabatan tertentu.

Awalnya dengan dalih suasana dalam keadaan perang, organisasi-organisasi massa yang sebelumnya sudah tumbuh di Aceh seperti Taman Siswa, PUSA, Parindra dan Muhammadiyah mendapat tekanan dari Jepang, sehingga organisasi-organisasi ini menjadi lumpuh selama masa pendudukan.³² Dapat disebutkan misalnya organisasi Taman Siswa, dibubarkan oleh Gunseibu, demikian pula dengan Perindra, PUSA dan Muhammadiyah pada mulanya tidak aktif, tetapi pada tahun 1943 diaktifkan kembali. Tetapi para pemimpinnya sudah disibuki oleh tugas rutin dalam birokrasi pemerintah Jepang.³³

Para simpatisan Jepang terutama dari golongan PUSA, yang sebelumnya menaruh harapan besar pada Jepang tentu merasa kurang senang dengan kebijaksanaan yang ditempuh oleh Jepang pada masa konsolidasi itu. Sehingga timbul hubungan yang dingin antara Jepang dan ulama. Rupanya Jepang menyadari strategi yang mereka tempuh tidak menguntungkan bagi strategi jangka panjang. Sebab mereka sadar bahwa elit ulama berpengaruh dalam masyarakat Aceh, yang menempatkan hukuman agama dan adat sebagai dua sisi muda, jadi dengan demikian potensi ulama harus dimanfaatkan. Ulama

Matahari Terbit. *Islam Indonesia Masa Pendudukan Jepang*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hal. 274

³²A. Arief, *Bingkisan Kenang-kenangan Kongres Besar PUSA dan Pemuda PUSA, Imdjauan Sedjarah Pengesahan PUSA di Atjeh*. (Seksi Penerangan Panitia Kongres Besar Kutaraja 1950), hal. 339-343.

³³Benda. *Bulan Sabit*. hal.15-16.

adalah kelompok yang sangat membenci Belanda pada masa sebelumnya. Jepang berusaha untuk menarik ulama dalam orbitnya.

H.J. Benda menggambarkan strategi Jepang dalam merebut posisi hati umat Islam Indonesia merupakan rangkaian strategi yang sudah lama mereka perhitungkan. Lebih tegasnya Benda menulis:

“Penemuan Islam oleh Jepang berawal tahun 1920-an, motivasinya adalah rencana-rencana ekspansionisme Dai Nippon, karena ada beberapa ratus orang Islam yang hidup di Jepang pada saat itu”.³⁴

Jepang juga memempuh strategi dengan mendatangkan jumlah mahasiswa Islam, baik dari Timur Tengah maupun dari negara-negara Asia, untuk datang ke Jepang, sebuah langkah awal Jepang adalah membuat jurnal berbahasa Arab untuk disebar di luar negeri. Meskipun dari segi agama secara murni Jepang tidak mungkin berhasil bercita-cita untuk menjadi pusat dunia Islam yang sebenarnya, berdekatan secara geopolitis dengan Indonesia tidaklah dapat diremehkan. Tambahan pula adanya propaganda Jepang yang cekatan hampir pasti sampai tingkat tertentu efektif di Indonesia. Dengan menekan persamaan antara Shinto dan Islam, di Jepang mengumbar harapan bahwa Kaisar akan beralih agama dan memeluk agama Muhammad.³⁵

Langkah-langkah Jepang dalam mendekati umat Islam Indonesia dalam analisa Benda bisa dilihat paling kurang di dua daerah Sumatera, kedatangan Jepang dipermudah oleh kelompok-kelompok Islam penentang anti-Belanda yang kelihatan diorganisir cukup rapi, beberapa diantaranya kelihatan telah didulukan dengan bantuan Jepang yang cukup besar. Di Aceh, kubu Islam

³⁴ Ibid, hal. 133.

³⁵ Ibid, hal. 135

pendukung Jepang disebut dengan organisasi F memainkan peran yang penting selama pendudukan.³⁶

Kerjasama Jepang dengan organisasi F yang beranggota PUSA, tidak sepenuhnya memenuhi harapan-harapan pemimpin-pemimpin PUSA. Jepang menaruh curiga terhadap pemimpin PUSA; dan mereka percaya bahwa pemimpin Aceh bekerja sama dengan mereka hanya untuk memperoleh kekuasaan bagi mereka sendiri. Oleh karena itu mereka sangat khawatir akan langkah-langkah Aceh menempatkan beberapa pemimpin PUSA dalam dinas pemerintahan setempat segera setelah kantor-kantor tersebut ditinggalkan oleh Belanda. Karena tidak menyenangkan keadaan ini, Jepang pun bergerak menentang PUSA. Segera setelah pendaratan di daerah itu, mereka menangkap beberapa pemimpin puncak PUSA, termasuk Tengku Daud Beureueh dan Tengku Husin al-Mudjahid.³⁷

Akibatnya, PUSA dan Pemuda PUSA menjadi tidak aktif selama pendudukan Jepang di Aceh. Hanya sesudah itulah Jepang dapat menguasai daerah tersebut dan, walaupun tidak mudah, melemahkan pengaruh ulama. Setelah menaklukkan PUSA, Jepang menempuh taktik klasik yang menyeimbangkan kaum ulama dan bangsawan seperti yang pernah dilakukan oleh Belanda. Kebanyakan unsur PUSA dipaksa melepaskan posisi mereka dalam pemerintahan lokal. Sebagai gantinya, sesudah menguatkan kekuasaan para uleebalang, Jepang menempatkan beberapa bangsawan. Tetapi Jepang juga mempertahankan beberapa pemimpin muda atau anggota pemuda PUSA

³⁶ Ibid. hal. 136

³⁷ Sjamsuddin. *Pemberotakan kaum Republik*. hal. 23.

dalam beberapa jawatan pemerintahan.³⁸ Barangkali Jepang tidak merasa terancam oleh orang-orang ini setelah PUSA dan pemuda PUSA dilumpuhkan.

Jepang menegaskan bahwa mereka hendak melanjutkan kebijakan kolonial Belanda dengan membiarkan pemerintahan pribumi berada di tangan uleebalang. Kebanyakan uleebalang, kenali mereka yang dipandang pro-Belanda dan tak dapat diperbaiki, disahkan kedudukannya. Keuntungannya ialah bahwa kedudukan pemerintah di tingkat kawedanan yang dahulu dijabat Belanda kini diberikan kepada orang-orang Aceh, dan tujuh belas dari orang Aceh yang diangkat adalah uleebalang. Pada akhir pendudukan, semua kedudukan tingkat kawedanan tersebut dipegang oleh uleebalang.

Namun waktu membuktikan bahwa kesinambungan otoritas uleebalang itu ternyata hanyalah khayalan belaka. Ketika perang mulai tidak menguntungkan Jepang dan ketika pengusai militer mulai menuntut lebih banyak dari rakyat Aceh untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan-serangan sekutu, maka Jepang memberikan konsesi-konsesi kepada mereka yang dianggap sebagai pemimpin yang populer, yaitu ulama. Jelas sekali perubahan yang paling penting yang meminta pembatasan wewenang uleebalang adalah perbaikan tata usaha pengadilan yang dilaksanakan pada awal 1944.

Satu aspek dari reorganisasi pengadilan ini adalah dibentuknya sistem pengadilan khusus guna melaksanakan hukuman Islam dalam persoalan yang menyangkut perkawinan, perceraian, pewarisan, zakat-fitrah, perwalian dan

³⁸ Lihat Abdullah Hussain. *Terjebak* (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1956), hal. 118.

status yatim piatu. Sistem pengadilan agama baru itu merupakan suatu kemengan penting bagi penerapan hukum Islam.³⁹

Selain merasa sudah tidak suka pada sistem pengadilan agama, kaum uleebalang juga menentang usul Jepang untuk membentuk sistem pengadilan sekuler baru, karena perubahan ini berarti hilangnya sama sekali wewenang di bidang pengadilan. Kedudukan uleebalang sebagai penguasa adat dipertanyakan begitu mereka dicabut dari dasar kelembagaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi adat. Pengganti uleebalang sebagai administrator hukum adalah *afive-man court* sebuah pengadilan yang terdiri dari lima orang, di masing-masing wilayah. Pembahasan ini tentu saja sangat berarti di Pidie, yang uleebalangnya telah menggunakan kekuasaan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa penggunaan dan pemilikan tanah yang menguntungkan dirinya. Hilangnya wewenang ini bagi uleebalang semakin diperbuat lagi oleh kenyataan bahwa Jepang sangat mempercayai nasihat-nasihat para pemimpin PUSA dalam mengangkat para anggota pengadilan-pengadilan baru itu.⁴⁰

Apa yang tersisa bagi uleebalang? Dengan satu kata, pemerintahan. Tetapi dibawah Jepang, pemerintahan menyebabkan terpisahnya para petani dari padi hasil panennya untuk memasok kebutuhan tentara pendudukan dan perekrutan tenaga kerja paksa (*romusha*) untuk mengembangkan instalasi-instalasi pertahanan.⁴¹ Uleebalang menjalankan tugas-tugas yang membangkitkan kebencian rakyat. Pera pemimpin PUSA berperan

³⁹ Kahin, *Pergolakan Daerah*. hal. 95.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 97.

⁴¹ Hussain, *Terjebak*. hal 115.

BAB III
REVOLUSI SOSIAL: PENGAMBILALIHAN
KEKUASAAN ULEEBALANG

A. Kemerdekaan RI dan Kondisi Pemerintahan Aceh

1. Berita Kemerdekaan R.I.

Pada akhir Agustus 1945 penguasa militer Jepang mengumumkan pada masyarakat bahwa perang telah berakhir. Baru setelah beberapa minggu berlalu, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus di Jakarta tersebar luas di Aceh. Di Kutaraja berita tentang proklamasi kemerdekaan baru diketahui tanggal 21 Agustus 1945, yaitu melalui para pemuda (Ghazali Yunus dan kawan-kawan) yang bekerja pada kantor berita Jepang, *Domei*. Mereka secara rahasia berhasil mendengarkan radio yang ditempatkan di sana dan setelah itu segera memberitahukan kepada teman-teman akrab mereka yang bekerja pada *Hokodo* (Kantor Berita Penerangan Jepang) dan harian *Atjeh Sinbun* di Kutaraja juga telah mengetahui berita gembira tersebut.¹

Beberapa hari kemudian Teuku Nyak Arief juga menerima kawat pemberitahuan tentang proklamasi kemerdekaan dari Dr. A.K. Gani di Palembang, serta Muhammad Syafei dan Adinegoro di Bukit Tinggi yang secara resmi melalui Mr. Teuku Moh. Hasan telah mengetahui berita tersebut masing-masing tanggal 24 dan 26 Agustus 1945.²

Dalam catatan Ismuha, diterimanya berita proklamasi kemerdekaan di Aceh dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih. Pengibaran

¹ Ismuha, "Pengetahuan Saja Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945", (Banda Aceh: Warta P dan K, no. 1, 1971), hal. 5-6.

² *Ibid.* hal. 26.

bendera itu terutama dilakukan di depan kantor-kantor resmi pemerintah Jepang, walaupun mendapat tantangan dan perlawanan dari tentara Jepang, pengibaran bendera meluas ke tempat-tempat umum, seperti tanah lapang, toko-toko serta tempat-tempat lain.

Untuk lebih meratakan pengibaran merah putih sampai ke pelosok-pelosok desa dan sejalan pula dengan memperingati dua bulan proklamasi kemerdekaan, tanggal 13 Oktober 1945 Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah Aceh, mengeluarkan maklumat no. 2 yang secara resmi memerintahkan pengibaran bendera sampai tanggal 17 Oktober pada tiap-tiap rumah di seluruh daerah Aceh. Isi maklumat tersebut selengkapnya ialah:

MAKLUMAT NO. 2

Dipermaklumkan kepada segenap penduduk bangsa Indonesia didaerah Aceh, supaya di muka tiap-tiap rumah dikibarkan bendera kebangsaan Indonesia, dengan ketentuan:

- a. Dikibarkan mulai ini hari sampai tanggal 17 Oktober 1945.
- b. Bendera dikibarkan mulai jam 7 pagi sampai 6 sore (Sumatera).
- c. Jika waktu hujan, bendera tidak usah dikibarkan.

Kutaraja, 13 Oktober 1945

Ketua Pusat
Komite Nasional
Tuanku Mahmud.³

³ Naskah asli maklumat ini dapat dilihat dalam Seksi Penerangan/Dokumentasi Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, dikutip oleh Abdullah Hussain, *Mexlat Revolusi 45*, (Kutaraja: 1960), hal. 54.

2. Pembentukan Komite Nasional (KNI) Daerah Aceh

Pembentukan Parlemen pertama di Indonesia yang bernama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 29 Agustus 1945 diikuti oleh Teuku Nyak Arief Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pembentukan Jepang (*Aceh-Syu-Sangi-kai*). T. Nyak Arief membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) Aceh pada tanggal 28 Oktober 1945 dan ia sendiri menjabat sebagai Ketua dan Tuanku Mahmud sebagai Wakil Ketua. Sebelum KNI Aceh secara sempurna terbentuk, di bawah Tuanku Mahmud sudah mengeluarkan tiga maklumat: pertama, tanggal 4 Oktober tidak bernomor mengenai Pemerintahan R.I. di Sumatera dan Aceh. Kedua, tanggal 10 Oktober maklumat no. 01 bahwa uang kertas Jepang masih berlaku dan uang kertas Belanda cetakan baru tidak berlaku di daerah Aceh. Ketiga, maklumat mengenai pengibaran bendera merah putih di seluruh daerah Aceh. Setelah secara resmi pemerintahan R.I. di daerah Aceh terbentuk Karisidenan Aceh sejak tanggal 3 Oktober 1945, susunan anggotanya disempurnakan, yakni sejumlah 65 orang dan ditunjuk berdasarkan pencalonan dari partai-partai. Selanjutnya jabatan ketua, sejak tanggal 10 Oktober 1945, seperti dari maklumat yang dikeluarkan, diganti oleh Tuanku Mahmud, sedang Teuku Nyak Arief tetap memangku jabatan residen Aceh, yang telah dijabatnya sejak 3 Oktober 1945. adapun kantor KNI daerah Aceh yang pertama adalah bekas *Centralkantoor derland schapskassen*, di Kutaraja.⁴

⁴ Lihat Mardanas Safwan, *Teuku Nyak Arief*. (Jakarta: Proyek Biografi Pahlawan Nasional Dept. P dan K 1978), hal. 11 dan 88.

3. Respon Ulama Terhadap Kemerdekaan R.I.

Dukungan kepada Republik dari para pemimpin keagamaan yang lebih tua datang pada tanggal 15 Oktober 1945 berupa maklumat ulama seluruh Aceh yang ditanda tangani oleh empat ulama terkenal: Tengku M. Daud Beureuch dan Tengku Ahmad Hasballah, keduanya pemimpin PUSA; Tengku Ja'far Sidik, seorang ulama yang menguasai *dayah* yang sudah lama berdiri; dan Tengku Hasan Kreung Kale, ulama konservatif yang terkemuka. Pernyataan ini menyerukan kepada rakyat agar bersatu di belakang "pemimpin besar kita Soekarno" dalam perjuangan melawan kembalinya Belanda ke "tanah tanah air kita Indonesia" "menghancurkan agama kita yang murni dan juga menindas serta merintangai keagungan dan kemakmuran rakyat Indonesia".⁵

⁵ Mengenai "Makloemat Oelama Seleroeh Atjeh", lihat seksi Penerangan/Dokumentasi Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh, *Atjeh Modal Revolusi 45* (Kutaradja, 1960), hal. 61. Maklumat ulama seluruh Aceh lengkapnya dan teks aslinya adalah sebagai berikut:

MAKLOEMAT OELAMA SELOEROEH ATJEH

Perang doenia kedoea jang maha dahsjat telah tammat. Sekarang di Barat dan Timoer oleh 4 kerajaan besar sedang diatoer perdamaian doenia jang abadi oentoek keselamatan machloek Allah. Dan Indonesia tanah toempah darah kita telah memakloemkan kemerdekaannya kepala seleroeh doenia serta telah berdiri Repoeblik Indonesia dibawah pimpinan jang moelia pemimpin kita Ir. Soekarno.

Belanda adalah satoe keradjaan jang ketjil serta miskin satoe negeri jang ketjil, lebih ketjil dari daerah Atjeh, dan hantjoer leboer, mereka telah melakoekan kechianatannja kepada tanah air kita Indonesia jang soedah merdeka itoe. Oentoek didjajahnja kembali kaloe maksoed jang djahanam itoe berhasil, maka pastilah memeras segala lapisan rakjat, merampas semoea harta benda negara dan harta rakjat dan segala kekajaan jang kita koempoelkan selama ini akan moesnah sama sekali. Mereka akan memperboedak rakjat Indonesia mendjadi hambanja kembali menjalan oesaha oentoek menghapoes agama Islam kita jang soetji serta menindas dan menghambat kemoelaaian dan kemakmoeran bangsa Indonesia.

Dibawah bangsa Belanda dan kaki tangannja telah melakoekan keganasan terhadap Kemerdekaan Repoeblik Indonesia hingga terjadi pertoempoeran di beberapa tempat jang achirnja kemenangan berada dipihak kita. Soenggoehpoen begitoe, mereka joega beloem insaf.

Sege nap lapisan rakjat telah bersatoe padoe dengan patoeh berdiri dibelakang maka Ir. Soekarno oentoek menoenggoe perintah dan kewadjiban jang akan didjalankan. Menoeroet kejakinan kami bahwa perdjoeangan ini adalah perdjoeangan soetji jang diseboet "Perang Sabil". Maka pentjajalah wahai bangsakoe, bahwa perjoeangan ini adalah sebagai sumbangan perdjoeangan dahoeloe di Atjeh jang dipimpin oleh almarhoem Tengkoe Tjhi di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan jang lain. Dari sebab itoe, bangoenlah wahai bangsakoe sekalian, bersatoe padoe menjoesoen bahoeh mengangkat langkah madjoe nenek kita dahoeloe.

Para ulama secara penuh mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari maklumat ulama seluruh Aceh yang ditanda tangani oleh empat ulama besar, ada empat hal yang yang menjadi pokok pikiran ulama dalam maklumat tersebut. Pertama, para ulama menilai bahwa pertarungan Perang Dunia II telah selesai. Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta, kewajiban rakyat dan pemimpin untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Kedua, Belanda merupakan negara miskin yang kecil dan selalu berusaha untuk menjajah Indonesia. Oleh sebab itu kedatangan mereka kembali ke Aceh harus dilawan. Hal ini merupakan tugas suci, karena kedatangan mereka juga bermaksud menghancurkan agama Islam. Ketiga, Belanda telah banyak melakukan penindasan terhadap rakyat, memasung hak-hak rakyat, hal ini terbukti dengan tidak ada kesadaran dari pihak kolonial untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Keempat, semua rakyat mendukung kemerdekaan Indonesia, dan perjuangan rakyat mempertahankan kemerdekaan adalah lanjutan dari perjuangan perang sabil yang sudah lama diperjuangkan oleh Tengku Cik di Tiro dan pahlawan-pahlawan bangsa lain.

Penyataan ulama ini adalah bukti komitmen mereka terhadap kemerdekaan R.I. dan panji-panji nasionalis ulama kalau dilihat dari perspektif

toendoenklah dengan patoeh akan segala perintah-perintah pemimpin tanah air dan agama dan bangsa.

Tengkoe Hadji Hasan
Kroeng Kale
Tengkoe Hadji Dja'far
Sidik Lamjabat

KOETARADJA, 15-10-1945
Atas nama oelama seloeroeh Atjeh.
Tengkoe M. Daud Beureueh
Tengkoe Hadji Ahmad Hasbailah
Indra poeri

maklumat ini, komitmen ulama tidak dapat diragukan lagi. Bagi ulama kemerdekaan Indonesia merupakan kemenangan bagi agama.

B. Pembentukan Pemerintahan Republik di Aceh

Pemerintahan Republik di daerah Aceh (Karesidenan) yang terbentuk di Kutaraja pada awal Oktober 1945, awalnya memperlihatkan kerja sama antara para ulama dan uleebalang yang anti-Belanda. Tampaknya, para ulama membiarkan unsur-unsur uleebalang untuk menguasai posisi-posisi penting dalam pemerintahan setempat semata-mata karena kekhawatiran bersama terhadap kembalinya Belanda. Teuku Nyak Arief, uleebalang *nanggro* di Aceh Besar, menjadi residen Aceh. Di dalam stafnya termasuk Ketua PUSA Tengku M. Daud Beureueh, yang menjadi kepala Kantor Urusan Agama dan anggota Komite Nasional Daerah. Namun demikian, persaingan antara ulama dan uleebalang terus berlangsung dalam barisan Republik terutama dikalangan pemuda. Ketika residen Aceh Teuku Nyak Arief mendirikan API (Angkatan Pemuda Indonesia), suatu embrio tentara nasional di daerah itu, korps perwiranya didominasi oleh para perwira *Gyugun* yang berorientasi kepada uleebalang dan bukan kepada PUSA. Pembentukan API segera diikuti oleh pendirian IPI (Ikatan Pemuda Indonesia), yang kemudian menjadi Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) yang dikendalikan pemuda-pemuda yang berorientasi kepada PUSA.

Sejak berita proklamasi diterima di daerah Aceh khususnya di Kutaraja, para pemimpin di Aceh telah memikirkan dan berusaha ke arah pembentukan organisasi pertahanan dan keamanan rakyat di daerah Aceh, dalam rangka

mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamasikan itu. Inisiatif ini pada mulanya datang dari beberapa bekas perwira *Gyugun* (organisasi pertahanan rakyat atau sukarela yang dibentuk Jepang dan kemudian dibubarkan). Inisiatif ini muncul dari Syamaun Gaharu, Nyak Neh Rika, Usman Nyak Gade, Teuku Hamid Azwar, Said Usman, Bakhtiar H. Idham.⁶

Pada tanggal 27 Agustus 1945 para perwira tersebut di atas berkumpul di salah satu kamar hotel sentral, Jl. Moh. Jam, pertemuan yang pertama kali ini dan tidak resmi karena menghindari pengawasan Jepang telah menghasilkan suatu keputusan, yaitu: mengirim utusan yang terdiri dari Syamaun Gaharu dan Tengku Hamid Azwar kepada Teuku Nyak Arief, guna mendengar pendapat beliau mengenai gagasan mereka. Hasil konsultasi itu ternyata sangat memuaskan Teuku Nyak Arief, yang pada waktu itu belum menjadi residen, tetapi diminta pertimbangannya.⁷

Setelah melakukan pembicaraan yang mendalam melalui beberapa kali musyawarah, akhirnya diputuskan untuk mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia (API) di seluruh daerah Aceh. Maka pada pertemuan bulan Oktober 1945 tersusunlah secara definitif struktur dan susunan pengurus API di Aceh, yang terdiri dari:

1. Markas Daerah, berkedudukan di Kutaraja dengan susunan pengurus
Ketua/Komandan: Syamaun Gaharu; Kepala Staf: T.A. Hamid

⁶ Usman Nyak Gade, *Sekitar Pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia (API) di Aceh*, dalam Seksi Penerangan dan Dokumentasi Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Isimewa Aceh.

⁷ *Ibid.* hal. 27-30.

Azwar Uleebalang; Sekretaris: Husin Yusuf; Anggota Sekretaris: Ishak; Anggota: Nyak Neh Rika, Said Usman, Said Ali, T.M. Daud Samalanga, Tengku Sarong, Baktiar Idham. Tengku Abdullah dan Jaiman.

2. Wakil Markas Daerah, untuk sementara dibentuk hanya 4 daerah, yaitu:
 - a. Wakil Markas Daerah Aceh Besar dan Pidie, dibawah pimpinan Nyak Neh;
 - b. Wakil Markas Daerah Aceh Utara dan Tengah, dibawah pimpinan T.M. Syah;
 - c. Wakil Markas Daerah Aceh Timur, dibawah pimpinan Bahtiar; dan
 - d. Wakil Markas Daerah Aceh Barat dan Aceh Selatan, dibawah pimpinan Cut Rahman.⁸

Setelah staf pengurusan API daerah Aceh berhasil disusun, pada tanggal 6 Oktober 1945, jam 13.00 wib, dikeluarkan seruan yang agar ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat agar membantu dan menyokong API yang lahir itu. Seruan yang telah mengejutkan pemerintah Jepang di Kutaraja pada waktu itu, selengkapnya berbunyi:

SERUAN TANAH AIR

Di seluruh Aceh telah berdiri Angkatan Pemuda Indonesia -API. API akan menjadi dasar tentara Republik Indonesia. API mempertahankan kemerdekaan Indonesia. API akan menjaga keamanan dan ketentraman umum.

⁸ *Ibid*, hal.31.

Di Kutaraja, Wakil Kepala Polisi Daerah Aceh, Muhammad Hasyim, setelah menerima kawat tanggal 1 Oktober 1945 dari bawahannya, Abdullah Husein di Langsa, juga bertindak untuk menguasai kantor polisi daerah Aceh. Inisiatif dalam waktu relatif singkat barisan kepolisian negeri Republik Indonesia berhasil dibentuk di daerah Aceh dan Muhammad Hasyim pada awal Revolusi kemerdekaan ditunjuk menjadi kepala polisi RI yang pertama di Aceh.¹¹

Di pihak lain, para pemuda yang tidak bergabung dalam API juga berusaha untuk mendirikan Badan Perjuangan Rakyat (BPR) dengan tujuan yang sama, yaitu mempertahankan proklamasi dari segala rong-rongan musuh, baik yang datang dari luar maupun dari dalam daerah. Di Kantor Surat Kabar Aceh Sinbun, para pengasuh surat kabar seperti A. Hasjmy, Talsya dan lain-lain, sejak berita proklamasi diterima di sana telah melakukan kegiatan untuk mendirikan sebuah organisasi pemuda yang diberi nama Ikatan Pemuda Indonesia (IPI). Pada tanggal 4 Oktober 1945 susunan pengurus IPI yang telah tersiar, terdiri dari Ketua I dan II: A. Hasjmy dan T. Manyak Arief; Setia Usaha I dan II: Usman dan Anwar Manyak; Bendahara: Zaini Bakry; Pembantu-pembantu M. Saleh Rahmany, Muhammad ZZ. Tuanku Abdul Wahab dan Muhammad Juned; dan diperlengkap dengan komisaris-komisaris Tuanku Hasyim, Ghazaly Yunus, Murdani, Tungku Idris, Asman Potan Harahap, Mukhtar Lubis, Said Ahmad Dahlan dan H. Jamin.¹² Kemudian pada tanggal 6 Oktober 1945 IPI bertukar nama menjadi Barisan Pemuda Indonesia (BPI)

¹¹ Ibid, hal. 568.

¹² Ibid, hal. 393.

dengan susunan pengurus yang diperbaharui, terdiri dari, Ketua Umum, I dan II: A. Hasjmy, M. Saleh Rahmany dan Muhammad Z.Z.; Setia Usaha Umum, I, II, III, dan IV, masing-masing terdiri dari Tengku Hasjmy, Potan Harahap, Sulaiman Arsyad Abubakar dan Sang Syarif; Bendahara: H. Jamin; dan dilengkapi dengan, badan Keuangan, ketua: Muhammad Junat; Badan Penerangan ketua: Sauni dan Zaini Bakry; Badan Kepanduan, ketua: Murdani, dan Badan Palang Merah, Ketua: Asman.¹³

Dengan terbentuknya API dan BPI berarti dasar-dasar organisasi kemiliteran dan perjuangan telah mulai diletakkan di Aceh. Dalam waktu relatif singkat kedua organisasi itu meluas ke seluruh daerah. Pembentukan API dan BPI ini, mengejutkan pemerintah Jepang di Kutaraja. Pemerintah Jepang lewat Atjeh Syu Tyokan S. Iino mengundang para pemimpin Aceh ke rumahnya guna membicarakan situasi ibukota Kutaraja khususnya dan daerah Aceh pada umumnya. Jepang melarang bentuk-bentuk badan militer di luar kendalinya. Larangan ini tidak di tampik oleh API dan BPI.¹⁴

Sementara itu Barisan Pemuda Indonesia (BPI), dalam rangka lebih meningkatkan organisasi itu sebagian Barisan kelayakaran dan penyebaran keseluruh daerah, pada tanggal 12 Oktober 1945 mengadakan konferensi pertama dengan mengambil tempat di rumah Tuanku Abdul Aziz, Jalan Mohd. Jam No. 1. Konferensi diikuti oleh para pemuda yang datang dari berbagai pelosok daerah Aceh atas undangan Husein al Mujahid yang pada mulanya dimaksudkan untuk membentuk suatu gerakan pemuda dengan tujuan

¹³ *Ibid.* hal. 394..

¹⁴ *Ibid.*

mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia, tetapi berhubung telah ada BPI rencana itu dibatalkan. Dalam konferensi itu diputuskan, bahwa pengurus pusat BPI yang telah disusun sebelumnya disetujui dan ditempatkan di Kutaraja, sedang di daerah-daerah Aceh Besar, Aceh Utara, dan Aceh Selatan, masing-masing ditempatkan seorang Wali Majelis Daerah (WMD), yaitu Teungku Abdul Jalil Amin, Teungku Abdul Gani, Teungku Usman Peureulak dan Teungku Muhammad Abdul Syam.¹⁵

Selanjutnya 5 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 1945, BPI bertukar namanya menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI); dan sejak waktu itu PRI Daerah Aceh mulai membentuk cabang-cabangnya diseluruh wilayah daerah Aceh, bahkan juga ranting-rantingnya di *Kemukiman* (daerah di bawah Negeri atau Kecamatan sekarang). Pada hari itu juga PRI Daerah Aceh mengeluarkan maklumat No. 4, berisi “panggilan umum” yang ditujukan kepada seluruh Pemuda Indonesia yang berumur 18 tahun ke atas untuk mendaftar diri menjadi anggota PRI di wilayah atau ranting setempat. Ditegaskan pula dalam maklumat itu, bahwa: “Kemerdekaan Tanah Air tidak didapati dengan jalan mengemis, tetapi ia harus ditempa oleh tangan poeteranya sendiri”. Kemudian tanggal 20 Desember 1945 berdasarkan Ketetapan Markas Tertinggi Pemuda Republik Indonesia di Yogyakarta, nama PRI Daerah Aceh mengalami perubahan lagi, yaitu Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO) Daerah Aceh, dengan ketuanya tetap seperti semula, ialah: A. Hasjmy.

¹⁵ Ibid, hal. 397-8.

Dapat ditambahkan, bahwa, meskipun Pesindo daerah Aceh bernaung dibawah Pesindo Pusat, namun orientasi idiologi-nya jauh berbeda, sehingga akibatnya sikap yang demikian Komisariat Dewan Pusat Pesindo Sumatera menganggap Pesindo daerah Aceh tidak sah; dan setelah meletusnya peristiwa Madiun (Pemberotakan PKI/Muso), pada tanggal 19 Oktober 1948 Pesindo daerah Aceh melepaskan hubungan organisasi dengan Pesindo Pusat yang telah turut campur dalam pemberontakan PKI itu.¹⁶

Karena Pesindo daerah Aceh mempunyai cabang dan ranting tersebar di seluruh wilayah, maka dengan tidak banyak menemui kesukaran organisasi itu berhasil baik mengkoordinir Lasykarnya, yaitu: Kesatria Pesindo, yang kemudian dikenal dengan nama: Divisi Rencong, Barisan Kelasykaran ini terdiri dari 7 resimen, masing-masing ditempatkan di Kutaraja, Sigli (Pidie), Lhokseumawe (Aceh Utara), Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Barat dan Aceh Selatan; ditambah dengan resimen wanita Pocut Baren dengan Komandannya dari wanita sendiri, ialah: Zaharadan satu Batalyon Istimewa Altileri yang dipimpin langsung oleh Komandan Divisi Nyak Neh Lhok Nga. Selain itu, divisi juga diperlengkapi dengan a.l. perbekalan/persenjataan, di Lhok Nga, pelayaran di Ulee Lheue dan Bank Pesindo di Kutaraja.¹⁷

Perlu juga dikemukakan, bahwa selama Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) antara kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata resmi (TKR/TRI) dan badan-badan kelasykaran di daerah Aceh, yang pada masa sekarang anggota-anggotanya itu dihitung sebagai veteran pejuang kemerdekaan dan jumlahnya

¹⁶ Ibid, hal. 399. T.A. Talsya, "Fragmen Revolusi 45 di Aceh (XVIII)", dalam *Sinar Darussalam* no. 75 76, (Banda Aceh, 1978), hal. 85-88.

¹⁷ Ibid.

diperkirakan tidak kurang dari 60.000 orang, tetapi yang baru terdaftar secara resmi pada kantor Administrasi Veteran I, Pusat Cadangan Nasional Daerah Aceh hanya 35.075 orang.¹⁸ Dalam berbagai kegiatan perjuangan yang mereka lamcarkan, selalu tampak berada dalam suatu koordinasi yang utuh: tidak terdapat unsur-unsur pemecah dan persaingan yang berarti yang dapat melemahkan perjuangan pada waktu itu. Hal ini, nanti setelah keluarnya penetapan pemerintah (Berita Negara No. 24 tahun 1947) dan ketetapan Wakil Presiden, selaku Panglima Tertinggi TRI pada waktu itu, tertanggal Bukit Tinggi, 26 Agustus 1947, no. 3/BKPU/47 mengenai penyatuan TRI dengan lasykar-lasykar rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di seluruh Indonesia, merupakan faktor yang memperlancar proses penyatuan TRI dengan Badan-badan Kelasykaran (Divisi Rencong, Teuku Chik di Tiro, Teungku Chik Paya Bakong, resimen TRIP dan TPI). Di daerah Aceh.¹⁹

C. Kedatangan Tentara Sekutu Dan Tentara Nica di Daerah Aceh

Wilayah Aceh yang berhasil diduduki oleh sekutu/Belanda selama Revolusi Kemerdekaan adalah pulau Weh (Sabang). Pulau yang terletak di ujung paling Utara Sumatera itu, dilihat dari kemiliteran memang cukup strategis, sebagai basis pertahanan terdepan dari arah Barat Laut Indonesia. Karena tidak mengherankan, apabila Jepang menjelang saat kekalahannya menempatkan kira-kira 10.000 kekuatan tentaranya disana di bawah komando Vice Admiral Hirose. Demikian pula dengan tentara Sekutu/Belanda, pertama-

¹⁸ *Harian Pelita*, Jum'at 27 April 1979, hal. III.

¹⁹ S.M. Amin, *Kenang-Kenangan*, hal. 96-97.

tama perhatiannya diarahkan ke pulau tersebut.pada tanggal 25 Agustus 1945 armada Sekutu yang terdiri dari beberapa kapal perang Inggris telah berada di muka pelabuhan Sabang. Dalam pasukan ini ikut serta Kesatuan Mirine Belanda dan juga Pemerintah Belanda yang menjadi bagian dari AMACAB (Administration Civil Affairs Branch).²⁰

Pada tanggal 29 Agustus 1945 Sekutu memanggil Guntyo Sabang, Teuku Abaih, ke kapalnya untuk diberitahukan, bahwa Jepang telah menyerah dan karenanya pulau Weh telah kembali kepada pemerintah Hindia Belanda. Dalam hubungan ini Teuku Abaih, sebagai kepala pemerintahan angkatan Jepang, khususnya dan rakyat pada umumnya, mengingat kekuatan tentara Sekutu dan Jepang yang besar di sana, tidak mungkin melakukan tindakan apa-apa selain dari menerima pembentahan tentara Sekutu tersebut. Semenjak itu, dengan dukungan Sekutu, pemerintahan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) mulai dirintis di pulau Weh. Sejak tanggal 3 September 1945, Letnan Hemers yang sekian lama ini bertindak atas nama sekutu, digantikan oleh seorang pegawai Nica, bernama C.A. Sani dalam kedudukannya selaku Comanding Officer. Untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari, C.A. Sani dibantu seorang kepala PID (*Politike inlichtingen Dienst*) yang bernama Emil Dahniel.²¹

Dengan berhasilnya diduduki pulau Weh, tentara Nica mempunyai basis pertahanan yang kuat di ujung Barat laut Indonesia. Dari sini, selama Revolusi Kemerdekaan, mereka selalu melancarkan Operasi Militer, melakukan

²⁰ T.A. Talsya perjuangan. Hal. 11.

²¹ A. Hasjmy dan T.A. Talsya, Hari-hari Pertama. hal. 7-8.

lagi lama-lama tinggal di Kutaraja dan tanggal 10 Nopember ia kembali ke Medan. Betapa gawat keadaan pada waktu itu dapat dilihat pada hari keberangkatan rombongan Knottenbelt: kendaraan, Teuku Nyak Arief terpaksa berjalan di depan sekali untuk menghindari hal-hal yang mungkin dapat mengancam jiwa utusan SACSEA itu.²³

Hasil penyelidikan Knottenbelt selama satu bulan di Aceh dituangkan dalam bentuk laporan sementara yang sekaligus juga merupakan sebuah rekomendasi yang berharga bagi Sekutu dan Belanda dalam menentukan sikap selanjutnya. Adapun isi laporan itu seluruhnya adalah sebagai berikut:

“Hendaknya dianggap sebagai kewajiban saya untuk memperingatkan disini, bahwa, menurut hemat saya, adanya utusan Sekutu di Aceh dapat memperburuk suasana. Sebab-sebabnya ialah: pertama; perselisihan paham yang timbul antara pihak Jepang dengan Indonesia mengenai masalah ‘siapa yang berkuasa sekarang’ yang sehari kesehari menjadi semakin parah; kedua; dengan adanya utusan sekutu di tempat itulah orang-orang Jepang, bahwa tindak tanduk mereka itu diamat-amati dan tahu pula orang-orang Indonesia, bahwa mereka tidak dapat mempengaruhi orang-orang Jepang untuk tidak mentaati perintah-perintah SACSEA; ketiga, Aceh dapat diibaratkan sebagai sebuah tong mesiu yang untuk meledaknya hanya diperlukan sebuah nyala api kecil, sementara seorang utusan SECSEA yang bijaksana dan ahli tidak akan mungkin dapat memadamkannya jika ia telah meledak, akan tetapi ia akan berguna sekiranya tangan api itu belum sempat mendatangkan suatu malapetaka.”²⁴

Berdasarkan laporan tersebut, maka pihak Sekutu tidak mendatangkan lagi utusannya ke Aceh dan rencana untuk menduduki daerah ini juga diurungkan. Demikian pula dengan pihak NICA, meskipun tidak sepenuhnya, mereka juga terpengaruh oleh rekomendasi Knottenbelt itu.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

D. Peristiwa Cumbok: Awal Perang Saudara

Menurut T. Ibrahim Alfian, pada masa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh terdapat beberapa kelompok elit yang mempunyai kecenderungan masing-masing dalam dan mempunyai orientasi politik yang berbeda dalam merespon Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu konstelasi politik sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau selama masa revolusi di Aceh merupakan refleksi dari interaksi yang berlangsung antara masing-masing kelompok elit. Kelompok elit tersebut adalah golongan uleebalang, golongan ulama, golongan pemuda dan keempat golongan cendekiawan.²⁵

Stratifikasi sosial keempat kelompok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, golongan uleebalang; adalah kelompok yang secara turun-temurun atau secara tradisional menduduki jabatan pemerintahan lokal di Aceh. Walaupun kelompok uleebalang secara sederhana dapat digolongkan kepada satu kelompok, tetapi sebenarnya mereka mempunyai status yang berbeda-beda. Perbedaan status ini berkaitan erat dengan usia silsilah dengan sultan Aceh, dan otoritas politik dalam tata feodal seperti luas daerah kekuasaan, dan sebagainya. Kedua, kelompok ulama; yang merupakan pemimpin spiritual dalam masyarakat Aceh. Seperti halnya dengan golongan uleebalang, mereka tergolong dalam kelompok elit ulama modernis dan ortodoks. Diantara kedua kelompok ini mempunyai organisasi yang agak teratur yaitu PUSA. Dengan demikian mereka mempunyai jaringan komunikasi dengan seluruh anggotanya

²⁵ T. Ibrahim Alfian dan kawan-kawan, *Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh (1945-1949)*, P dan K, proyek Pengembangan Permusiuman, (Banda Aceh: 1998). hal. 65-66.

yang tersebar di seluruh Aceh. Sejak masa pendudukan Jepang, elit ulama modernis sudah menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, terutama yang berhubungan dengan keagamaan seperti Teungku M. Daud Beureueh, Teungku A. Wahab Seulimun, Teungku Hasbalah Indrapuri dan Teungku Ismail Yakub. Sedangkan ulama ortodok umumnya masih tetap meneruskan peran tradisionalnya, terutama di pesantren-pesantren. Diantaranya adalah Teungku Hasan Krueng Kale dan kawan-kawan. Kelompok ketiga, adalah kelompok pemuda, yaitu kelompok pemuda uleebalang dan pemuda ulama, yang pertama adalah elit yang mendapat pendidikan militer Jepang seperti Syamaun Gaharu, T.A. Hamid Azwar dan kelompok kedua mendapat pendidikan sekolah keagamaan modernis seperti Teungku Amir Husin al Mujahid, Ali Hasjmy dan Cek Mat Rahmany. Mereka kelompok yang pertama membentuk angkatan bersenjata di Aceh yaitu API, sedangkan kelompok yang kedua, membentuk badan-badan kelasykaran. Kelompok elit yang keempat adalah golongan minoritas yaitu para cendekiawan ataupun pemimpin golongan minoritas yang bersal dari daerah luar Aceh seperti Mr. S.M. Amin, Sutikno Padmosuparto Jahn Lie dan Ali Murtolo.²⁶

Menilik pendapat Ibrahim Alfian tersebut, kelompok-kelompok di atas dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok saja. Pertama; kelompok ulebalang dan pasukan pemudanya, kedua; kelompok ulama dan pasukan pemudanya, ketiga; kelompok cendekiawan atau kelompok pemimpin golongan minoritas

²⁶ *Ibid.*

dari luar Aceh. Polarisasi yang terjadi dalam peristiwa Cumbok ini adalah pertentangan dua kutub, yaitu kutub uleebalang dan kutub ulama.

Ketegangan dua kelompok dimulai sejak Residen Aceh T. Nyak Arief menginginkan sebuah tentara yang berdasarkan keahlian dan pengalaman orang-orang yang telah mendapatkan pendidikan perwira dari Jepang. Hal ini, sebenarnya, berarti bahwa pemimpin tentara harus diserahkan kepada kelompok kecil perwira yang terlatih dan kebanyakan dari mereka adalah uleebalang. Hanya sedikit yang dikenal sabagai pemuda PUSA yang menerima latihan pendidikan perwira dari Jepang. Hal ini menyebabkan kecemburuan pemuda aktivis PUSA dan menjauhkan mereka yang tidak diberi kesempatan untuk berperan di dalamnya. Gejolak ini adalah awal dari muncul gelombang kekerasan di daerah Aceh pada akhir 1945 dan awal tahun 1946 yang mengakibatkan tergulingnya kaum uleebalang.²⁷

Dalam penuturan Van Dijk, perang saudara di Aceh tidak bisa semata-mata dijelaskan dari segi pertentangan antara adat dan agama atau antara kaki tangan Belanda dan pendukung kemerdekaan. Lebih jelasnya Dijk menulis:

“Pecahlah perang saudara di Aceh beberapa bulan sesudah Jepang menyerah. Uleebalang diserang ulama dan para pengikutnya di seluruh Aceh. Menjelaskan pergolakan ini semata-mata dari segi pertentangan antara adat dan agama atau antara kaki tangan Belanda dan penganjur kemerdekaan Indonesia terlalu mudah. Dalam hal yang terdahulu terlalu tajam ditarik perbedaan antara adat dan agama. Yang sesungguhnya keduanya dibayangkan sebagai muslim dalam suatu masyarakat yang semuanya mengakiri muslim ..., dalam konflik tersebut motif ekonomi dan politik meskipun demikian memainkan bagian utama, dan malahan lebih penting ketimbang motif keagamaan”.²⁸

²⁷ Kahim, *Pergolakan Daerah*, hal. 99.

²⁸ Dijk, *Darul Islam*, hal. 259.

Persaingan militer antara yang resmi dan tidak resmi akhirnya memunculkan konflik. Dalam pandangan Alian, kelompok elit bangsawan yang masih tetap meneruskan tradisi pemerintahan lokal pada mulanya tidak membentuk pasukan militer atau kelasykaran karena sudah cukup puas dengan API bentukan T. Nyak Arief. Sementara kelompok pemuda PUSA yang tidak mendapat kesempatan masuk API, membentuk lasykar sendiri seperti PESINDO, BPI, Mujahidin, Hisbullah dan lain-lain. Tetapi pembentukan laskar-laskar yang merupakan "tentara bayangan" di samping API menimbulkan perasaan curiga di kalangan sebagian kelompok elit uleebalang, terutama di daerah Pidie.²⁹

Sikap kecurigaan itu pada tingkat tertentu membawa kepada konflik seperti yang terjadi antara asisten Residen Teuku Cut Hasan dengan satuan lasykar BPI pada waktu upacara pengibaran bendera merah putih di Sigli, demikian juga halnya dengan peristiwa yang sama antara satuan BPI dengan uleebalang Cumbok di Lameulo.³⁰

Insiden Sigli dan Lameulo itu menimbulkan reaksi luas dalam kalangan elit ulama yang mereka tafsirkan sebagai pahlawanan terhadap Pemerintahan Republik. Sebaliknya para uleebalang di Pidie merasa dirinya terancam oleh reaksi dari pihak ulama.

²⁹ Dalam wawancara penulis dengan Prof. Dr. H. T. Ibrahim Alfian, tentang uleebalang Pidie, beliau berpendapat bahwa uleebalang Pidie adalah uleebalang yang paling otoriter di Aceh. Sehingga wajar kalau revolusi sosial meledak disana, orang-orang uleebalang disana kebanyakan melakukan penipuan dan pemerasan terhadap rakyat. Salah satunya beliau menyebut Teuku Moeda Dalam ayah dari Teuku Yusuf Muda Dalam yang dihukum mati oleh rezim Soeharto, Teuku Muda Dalam membeli mobil dengan uang zakat penduduk, sehingga ketika mobilnya lewat di hadapan orang kampung disebut dengan "moto jakaut" (mobil zakat), lihat juga T. Ibrahim Alfian, *revolusi Kemerdekaan...*, hal. 89.

³⁰ Lihat Nazzaruddin Syamsuddin, *The Course of The national Revolution in Aceh, 1945-1949*, Chesi, (Monosh university: 1974), hal. 122

Menyadari situasi demikian, Teuku Umar Keumangan, Beureuen, mengambil prakarsa untuk melaksanakan pertemuan uleebalang pada tanggal 22 Oktober 1945 di Beureuen, Pidie. Pertemuan untuk membicarakan masalah konsolidasi kekuatan dan memperkuat solidaritas antara para elit uleebalang yang tampaknya tidak semulus yang diharapkan. Hal demikian tampak pada ketidak hadiran beberapa orang diantara mereka. Di sini jelas menunjukkan perbedaan kepentingan dari masing-masing uleebalang.³¹

Uleebalang melakukan usaha pembentukan markas uleebalang di bawah pimpinan Teuku Muhammad Daud Cumbok dengan berkedudukan di Lameulo. Untuk mendampingi lasykar-lasykar yang sudah terbentuk di Aceh, lalu mereka memandang perlu untuk membentuk badan kelasykaran yang akan menjadi ujung tombak mereka, yaitu Barisan Penjaga Keamanan (BPK) dan Perhimpunan Indonesia.³²

Barisan Penjaga Keamanan (BPK) ini mempunyai tiga kesatuan:

1. Barisan cap bintang dengan tugas utama menghadapi perlawanan rakyat yang menentang kekuasaan para uleebalang.
2. Barisan cap sauh dengan utama di bidang usaha keangan untuk membiayai gerakan mereka.

³¹ Pertemuan itu bukan saja tidak berhasil mengumpulkan para uleebalang yang cukup berpengaruh di luar Pidie seperti T. Panglima Blem Muhammad Ali, Teuku Nyak Arief dan Teuku Daudsyah, tetapi juga berhadapan beberapa uleebalang di Pidie, yang punya hubungan dengan kaum republik seperti Teuku Bentara Pincung (ayah Mr. Teuku Moh. Hasan Gubernur Sumatera) tidak menghadirinya, untuk lebih jelasnya lihat Nazaruddin Sjamsuddin, *ibid.* hal. 123.

³² *Ibid.*

3. Barisan cap tombak dengan rugas utama menangkap para pemimpin rakyat yang menentang atau menghalang-halangi mereka.³³

Pembentukan lasykar BPK ini menimbulkan suasana yang tidak kondusif dengan lainnya, terutama BPI/PRI yang sudah mengembangkan sayap di daerah-daerah ke uleebalangan di Pidie. Suasana tidak nyaman terasa dalam rangka meraih pengaruh di kalangan masyarakat luas, terutama di daerah basis BPK, yaitu Lameulo. Suasana tidak nyaman dalam proses interaksi mereka pada tingkat tertentu menimbulkan konflik. Perlengkapan terhadap beberapa anggota satuan PRI di Lameulo pada tanggal 8 Nopember 1945 kantor PRI Lameulo diduduki oleh uleebalang.³⁴

Suasana tegang itu menyebabkan munculkan isu tentang pembentukan *Comite van Ontuungst* di Lameulo, suatu badan yang mempersiapkan untuk menyambut kedatangan kembali Belanda di Aceh, isu tersebut dimanfaatkan oleh pihak revolusioner untuk menyudutkan gerakan uleebalang.³⁵

Revolusi dipercepat oleh gerakan uleebalang menyerang PRI di Lameulo, lalu mereka bergerak Sigli, yaitu untuk memperoleh senjata dan serdadu Jepang yang bakal meninggalkan daerah Aceh. Tindakan ini mereka lakukan secepatnya agar senjata Jepang tidak jatuh kepada pihak ulama. Untuk mewujudkan rencana tersebut satuan BPK berangkat memasuki kota Sigli pada tanggal 25 Nopember 1945. rencana BPK cepat diketahui oleh PRI. Oleh

³³ S.M. Amin, *kenang-kenangan dari masa lampau*, (Jakarta: Paramita, 1978), hal. 10-16

³⁴ Syamsuddin, *the Course of The National Revolution*, hal. 128

³⁵ Kebenaran tuduhan ini samai saat ini belum dapat dibuktikan dan memerlukan penelitian lagi yang lebih mendalam, lihat Abdullah Husain, *Peristiwa*, (Kuala Lumpur: 1952), hal. 263.

karena itu PRI juga memasuki kota Sigli untuk menahan Jepang agar jangan menyerahkan senjata kepada uleebalang.

Menurut Tengku A.K. Jakobi dalam bukunya *Aceh Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949*, Teuku Nyak Arief, pemimpin tertinggi API/TKR yaitu pasukan resmi pemerintah telah merencanakan operasi pelucutan senjata Jepang yang akan digunakan untuk mempersenjatai pasukan keamanan dan keselamatan Indonesia di Aceh, Teuku Nyak Arief dengan Residen Jepang telah membuat kesepakatan bahwa senjata Jepang hanya boleh di suahkan kepada pasukan API.³⁶

Jakobi mencurigai kelompok komunis ikut memperkeruh ketidak harmonisan hubungan antara dua kelompok besar di Aceh, hal ini ditandai dengan kehadiran Nadhar Zainuddin yang dikenal sebagai tokoh PKI di tingkat Internasional. Ia pernah dibuang ke Boven Digul oleh Belanda. Ketidak wajarannya itu juga terlihat ketika Syamaun Gaharu harus melewati penjagaan PUSA yang sangat ketat, sedangkan penjagaan uleebalang baru ditemui di dalam kota. Ia melihat massa rakyat yang dipimpin oleh tokoh-tokoh PUSA mengepung uleebalang dan para pengikutnya yang telah menduduki kota Sigli sejak 1 Desember 1945.³⁷

³⁶ Sesuai dengan perjanjian Jepang akan menyerahkan senjatanya pada tanggal 5 Desember 1945, dari pihak pemerintah kemerdekaan diwakili oleh wakil Residen Aceh Teuku Muhammad Ali Panglima Polim. Residen Aceh T. Nyak Arief tidak bisa hadir karena sakit. Teuku Muhammad Ali di dampingi oleh Teuku Dirham Meuraksa, mewakili Gubernur Sumatera. Pada tanggal yang sama juga berangkat Komandan Markas Daerah API, Syamaun Gaharu, sepanjang perjalanan dari Padangtiji sampai se Peukan Pidie, Syamaun Gaharu melihat rakyat berjalan kaki menuju Sigli dengan membawa senjata. Untuk lebih jelasnya lihat Tengku A.K. Jakobi, *Aceh Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949*, Gramedia, (Jakarta: 1998), hal. 306.

³⁷ Ibid.

Penyelesaian ketegangan sebenarnya telah dicoba oleh kedua belah pihak, sengketa perebutan senjata antara ulama dan uleebalang dan Jepang diselesaikan agar senjata Jepang diserahkan saja kepada republi melalui Residen Aceh Teuku Muhammad Ali Panglima Polim, Teuku Djahan Meuraksa dan Aboe Bakar. Sedangkan di pihak uleebalang diwakili oleh Teuku Pakeh Sulaiman dan Hasan Ali dari PUSA. Pemerintah Jepang diwakili oleh *Buusui-Cho* (M. Mituaka) dan *Kaibiti-Cho* (M. Sokata), keduanya adalah utusan dari Gubernur Sumatera. Isi surat perjanjian tersebut adalah:³⁸

1. Lima (5) hari lamanya tentara kita dikepung oleh puluhan ribu orang Barisan Indonesia. Memiliki keadaan ini terpaksa kita menyerahkan senjata kepada mereka. Karena itu senjata-senjata kepunyaan kita, seperti tertera di bawah ini, kita serahkan dalam tangan orang Indonesia yang berwajib. Senjata tersebut ada dalam daftar terlampir.
2. Mulai pada saat penyerahan senjata-senjata tersebut dan seterusnya pihak Indonesia menjamin tentang keselamatan dan harta-harta orang Nippon yang berkedudukan di daerah ini. Begitupun pula bila tentara kita dan orang-orang Nippon berkedudukan di daerah ini perlu dipindahkan ke lain daerah, juga menjamin keselamatan sampai tiba tujuan.
3. Senjata-senjata tersebut kemudian juga tidak akan dipakai selain tujuan menjaga - keamanan umum. Selanjutnya pihak Indonesia menanggung jawab untuk menyimpan senjata senjata tersebut.

³⁸ *Ibid.*

Letusan tersebut diketahui dari uleebalang yang mempertahankan kota dipangkal jembatan. Tidak lama kemudian tembakan disambut pihak PUSA dari Pante Tengah. Pemimpin API/TKR Teuku Hamid Azwar memberi ultimatum agar semua senjata yang diperoleh uleebalang di Sigli dan tentara Jepang diserahkan kepada API/TKR pasukan resmi pemerintah Indonesia. Ia meminta kepada dua pihak yang bertikai kembali ke tempat mereka masing-masing. Teuku Himid Azwar bertindak sebagai militer netral dan mengambil tindakan tegas untuk kepentingan Republik sesuai dengan intruksi Residen Aceh Teuku Nyak Arief, meskipun ia harus berhadapan dengan saudaranya sendiri.³⁹

Sebagai akibat meletusnya tembak-menembak antara dua kelompok di atas, Jepang tidak mau menepati janji untuk menyerahkan senjatanya kepada pemerintah Indonesia. Perpecahan ulama-uleebalang memuncak menjadi Revolusi Sosial.

Cara melucuti senjata dari Jepang merupakan sebab langsung terjadinya konflik bersenjata antara golongan ulama dan uleebalang. Pertengkaran senjata yang telah direbut dari Jepang di Sigli menimbulkan serangkaian peristiwa yang akhirnya mengakibatkan kejatuhan uleebalang.

Jepang bermain di belakang layar. memanfaatkan perpecahan yang terjadi dengan memberi senjata kepada uleebalang. Senjata yang disimpan di gudang Leupeum dan Titeue diserahkan kepada pihak Cumbok. Sementara itu, Abu Daud Tangse dari PUSA berhasil merampas senjata di gudang Lingkok.

³⁹ *Ibid.*

Dengan hasil rampasan senjata itu PUSA mengimbangi lawan ketika pecah Perang Cumbok.⁴⁰

Tindakan Jepang tersebut menimbulkan suasana genting antara BPK dengan PRI. Akibatnya terjadilah bentrokan senjata antara kedua lasykar itu pada permulaan Desember 1945. Bentrokan senjata yang berlangsung antara BPK dan PRI di Sigli mengundang perhatian pemerintah daerah. Atas inisiatif pemerintah daerah melalui TKR, pertempuran yang berlangsung di Sigli dapat dihentikan pada tanggal 6 Desember 1945. Jalan penyelesaian yang ditempuh yaitu pengosongan kota Sigli oleh kedua lasykar, penyerahan keamanan kota Sigli kepada TKR, dan penyerahan senjata kepada TKR.⁴¹

Menurut S.M. Amin dengan terhentinya pertempuran di kota Sigli tidak berarti perdamaian telah tercapai. Ketetapan yang telah disetujui bersama itu, tidak semuanya ditaati. Pertempuran masih berlangsung di luar kota Sigli; Markas uleebalang ternyata tidak mengembalikan seluruhnya senjata yang diperoleh dari Jepang kepada TKR. Kemudian tanggal 10 Desember 1945 Markas uleebalang untuk kedua kalinya mengadakan pertemuan di kediaman Teuku Laksamana Usman, uleebalang Nyong di Leungputu, hasil pertemuan itu telah turut memperuncing suasana kembali dan ini berarti tidak menghiraukan lagi ketentuan yang telah disepakati bersama di Sigli, dalam pertemuan diputuskan agar uleebalang menanggapi dan kalau perlu membunuh

⁴⁰ Ibid, hal. 310.

⁴¹ S.M. Amin, *Kenang-Kengann Dari Masa Lampau*, Pradiya Pramita, (Jakarta, 1978), hal. 133-134.

para pemimpin yang menentang gerakan mereka. Dan diharapkan akhir Desember 1945, pelaksanaan rencana ini sudah selesai.⁴²

Untuk merealisasi keputusan pertemuan Leungputu, tentara Markas uleebalang, BPK segera bertindak. Mereka mulai melepaskan tembakan-tembakan terhadap kampung-kampung yang diperkirakan sebagai tempat pemusatan kekuatan lawan mereka. Kemudian disusul pula dengan aksi pembakaran gedung-gedung diperhitungkan akan digunakan sebagai pertahanan atau tempat pertempuran pemuda-pemuda dan pemimpin-pemimpin lawannya itu. Tanggal 16 Desember 1945, BPK dengan senjata-senjata berat yang dimilikinya, menembaki kampung-kampung di sekitar Luengputu dan Meutareum yang memang selama ini menjadi pemusatan pemuda dari PUSA. Tanggal 20 Desember 1945 mereka membakar gedung sekolah agama di Tieteu serta kantor-kantor kehakiman di beberapa tempat.⁴³

Menghadapi tindakan markas uleebalang yang semakin meningkat itu, di pihak lain para pemimpin dan pemuda yang jiwanya tampak semakin terancam, mulai pula mengkoordinir diri secara lebih terpadu. Pada tanggal 22 Desember 1945, mereka mendirikan suatu organisasi yang diberi nama Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) dengan kedudukan sementara di Gampong Garut dan kemudian dipindahkan ke kota Sigli. Organisasi ini ternyata mendapat sambutan hangat dari sebagian besar rakyat kecil: dimana-mana di seluruh daerah Pidie didirikan barisan-barisan perjuangan yang tunduk dibawah komandan MBRU itu. Akibatnya Markas uleebalang lebih meningkatkan lagi

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid.*

kwalitas serangan bersenjata: pada tanggal 30-31 Desember 1945, tembakan-tembakan mereka kembali diarahkan ke Meutareum, Langsa, Ilot dan Lala, sehingga kampung-kampung di sekitarnya mengalami kerusakan berat.⁴⁴

Pertempuran di berbagai tempat terus berlangsung selama sisa bulan Desember. Pasukan-pasukan uleebalang membangun empat kubu di berbagai bagian Pidie dan memiliki lebih banyak senjata api sehingga memungkinkan mereka untuk mengadakan serangan yang berulang kali. Para aktivis MBRU meminta kepada pemerintah agar segera mengganti seluruh kekuasaan di Pidie dan disusun kembali berdasarkan "kedaulatan rakyat".

Dalam kacamata Audey R. Kahin, pertempuran Pidie sebagian ditentukan oleh siasat politik di Kutaraja dan sebagian lagi oleh gerakan pasukan-pasukan PUSA dari Aceh Utara ke Pidie. Dalam menghadapi keraguan pejabat, para pemimpin PUSA dan pemuda menunjukkan alasan-alasan mereka melawan uleebalang di dalam KNI (Komite Nasional Indonesia) keresiden Aceh. Pada waktu yang sama Tengku M. Daud Beureueh mengintruksikan para pemimpin PUSA di Aceh Utara untuk memobilisasi para anggota Pesindo dan Mujahidin guna menyerang bagian timur Pidie. Sebagai Komandan Teuku Abdul Wahab Seulimeum, seorang ulama reformis terkemuka dari Aceh Besar, menarik hati pemuda pedesaan untuk bergerak memasuki Pidie pada minggu terakhir bulan Desember.⁴⁵

Ketika ribuan pemuda dan penduduk desa dari segala jurusan menuju markas uleebalang di Lammeulo, penyelesaian akhir sudah dekat. Tetapi

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Kahin, *Pergolakan Daerah*, hal 101.

sifatnya ditentukan di Kutaraja, yang para ulama dan pemimpin pemuda pada akhirnya berhasil memaksa para pemimpin Republik yang ragu-ragu untuk menentang uleebalang Pidie. Pada tanggal 8 Januari 1946, pemerintah keresidenan Aceh dan MBRU (Markas Besar Rakyat Umum)⁴⁶ mengeluarkan dua buah pengumuman bersama. Yang pertama, mencap pasukan-pasukan yang berpusat di Lammeulo sebagai “pengkhianat dan musuh republik Indonesia”. Yang kedua, meminta agar mereka menggerakkan senjatanya. Kedua pengumuman ini tidak mengubah hasil akhir konflik di Pidie, bahkan memberi wibawa legalitas-legalitas kepada kaum sosial-revolusioner itu kemudian agar tindakan-tindakan mereka dibenarkan. Dalam ungkapan S.M. Amin, “Tindakan-tindakan PUSA, yang semula dianggap ilegal, kemudian menjadi legal. Pemerintah daerah membenarkan tindakan PUSA dan mengambil alih usaha PUSA untuk menghancurkan uleebalang yang dianggap sebagai pengkhianat negara, yang berarti pemerintah bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkan cumbok”.⁴⁷

Uleebalang Pidie tidak memperdulikan ultimatum itu. Hanya dalam beberapa hari saja, Lammeulo jatuh, dan kepala adat kemudian ditangkap. Pemerintah karesiden meminta agar para uleebalang itu dibawa ke Kutaraja untuk diadili. Tetapi mereka tidak pernah diajukan ke pengadilan “Pada Waktu

⁴⁶ Badan ini dibentuk pada tanggal 30 Desember 1945 untuk mengkoordinasi kegiatan jawatan-jawatan pemerintah, laskar-laskar yang berdiri sendiri dan partai-partai politik. Kolonel Syamaun Gaharu sebagai komandan TKR, adalah ketua pertamanya. Pengurus Markas Umum Daerah Aceh lengkap adalah: Penasehat; residen Aceh, Teuku Nyak Arief, ketua: Kolonel Syamaun Gaharu, wakil ketua: Mayor Teuku Muhammad Syah; anggota: Husin Yusuf, Nyak Umar, Jailani, Teuku Muhammad Daud Beureueh, A. Hasjmy, Abdurrahman dan T.M. Amin. Untuk lebih jelasnya lihat Tengku A.K. Jakobi, *Aceh dalam perang*, hal. 312.

⁴⁷ M. Amin, *disekitar peristiwa berdarah di Aceh* (Jakarta: 1956) hal. 14.

itu”, tulis seorang pemimpin Pesindo, “Dalam Hati Rakyat Menggema Semboyan: “Rakyat telah menjadi Hakim”. Karena rakyat menjadi hakim, kaum uleebalang Pidie itu benar-benar dihabiskan. Kecuali dua orang, pasukan-pasukan Pesindo dan Mujahidin menghukum mati semua yang menjadi kepala adat wilayah pada zaman Belanda dan zaman Jepang. Juga para pemuka yang diangkat menduduki jabatan seperti militer dan sipil Republik di Pidie mereka bunuh. Lalu penduduk pedesaan menoleh kepada para anggota keluarganya yang masih hidup, dalam beberapa peristiwa mereka membunuh semua laki-lakinya dan dalam peristiwa lainnya hanya menyisakan anak-anak lelaki yang paling kecil. Keluarga yang masih hidup hartanya dirampas habis-habisan begitu penduduk desa mengambil alih harta kekayaan uleebalang. Rizky yang tidak disangka-sangka bagi mereka adalah didapatkannya milik yang paling dihargai tinggi di Pidie, yaitu sawah. Para penyewa mengambil alih tanah yang mereka garap untuk kepentingan adat, pemilik tanah tersebut, dan mereka yang percaya bahwa uleebalang telah merampas tanah mereka atau milik leluhur dengan cepat menyatakan hak mereka akan ladang padi, kebun kelapa, kebun pinang.⁴⁸

Selain kaum uleebalang dikalahkan, para pemimpin markas besar rakyat mengadakan rapat-rapat umum untuk membentuk pemerintah yang berdasarkan “kedaulatan rakyat”. Teungku Abdul Wahab Seulimeum, Panglima kesatuan rakyat dari Aceh Utara, diangkat menjadi asisten residen yang baru untuk Pidie, dan Hasan Ali, pemimpin Pesindo menjadi wakilnya.

⁴⁸ Teuku Ali Barsyah Talsyah, *Sedjarah dan Dokumen-Dokumen Pemberontakan di Atjeh*, (Jakarta: Kusuma, 1955) hal. 21-25.

Para pengikut PUSA mengambil alih semua kedudukan pemerintahan tingkat bawah "atas nama rakyat".

Akibat peristiwa Pidie segera terasa dibagian-bagian Aceh lainnya. pada pertengahan Februari 1946, 23 uleebalang di Aceh Besar menyatakan tanggap terhadap "kedaulatan rakyat", mereka bersedia mengundurkan diri untuk memberi tempat kepada kepala-kepala daerah pilihan rakyat. Tanpa harus mempertahankan kedudukannya dalam pemerintahan keresidenan dan di daerah-daerah di luar Pidie, tetapi situasi ini akan segera berubah.⁴⁹

Dalam bulan Februari kekacauan meletus di Aceh Timur yang memberikan tanda dimulainya revolusi sosial tahap kedua. Teungku Amir Husein al-Mujahid, Ketua pendiri pemuda PUSA, menyatakan dirinya sebagai panglima TPR (Tentara Perjuangan Rakyat), suatu pasukan yang dibentuk untuk menggulingkan uleebalang yang dianggap pro-Belanda oleh Teungku Amir Husein al-Mujahid. Sebenarnya TPR tidak banyak menyerupai tentara, karena para anggotanya tidak memiliki atau sedikit sekali mengenal latihan kemiliteran. Tetapi panggilan Teungku Amir Husein al-Mujahid yang bersemangat untuk berjuang bagi kepentingan rakyat, kepribadiannya yang menarik, seorang orator yang kemahirannya berkias tidak tertandingi, segera menarik ratusan pemuda desa untuk bergabung ke dalam pasukannya. Setelah berhasil mencopot para pejabat uleebalang di Aceh Timur dan mengangkat penggantinya, Teungku Amir Husein al-Mujahid melantik seorang ulama

⁴⁹ T.M.A. Panglima Polim, *Memoir (Tjataan)*, Alhambra. (Banda Aceh: 1972). hal 28-29.

PUSA menjadi asisten residen Aceh Utara yang baru. Kemudian TPR melanjutkan gerakannya disepanjang pantai utara menuju ibukota keresiden.

Pada bulan Maret, TPR yang kini sudah berjumlah ribuan bergerak memasuki Kutaraja. Teungku Amir Husein al-Mujahid menuntut pemecatan Mayor Jendral Teuku Nya' Arief sebagai pengawas tentara dengan pangkat Mayor Jendral, sedang Husin Yusuf, pewira tentara dengan tertinggi yang mempunyai hubungan dengan PUSA, diangkat sebagai komandan divisi menggantikan Syammaun Gaharu. Dikalangan sipil, pejabat residen Teuku Ci' Muhammad Daud Syah dinaikkan sebagai residen, kedudukannya yang dijabatnya selama masa revolusi sebelumnya; dan Teuku M. Amin, sekretaris PUSA diangkat menjadi asisten residen.

Dalam beberapa hari saja sejumlah uleebalang dan bekas pewira tentara, termasuk Teuku Nyak Arief dan Syammaun Gaharu, dikenakan penahanan. TPR menahan uleebalang Aceh Besar, bahkan juga mereka yang secara suka rela mengundurkan diri sebulan sebelumnya. Lalu sebuah pasukan pemuda bergerak turun ke pantai untuk mengumpulkan uleebalang Aceh Barat dan Aceh Selatan. Kurang lebih 60 orang ditawan di pegunungan Aceh Tengah, antara lain Teuku Nyak Arief, yang meninggal dua bulan kemudian.

Menjelang akhir Maret 1946, revolusi sosial itu berakhir. Namun pengalaman Aceh itu tidak diakui sebagai bagian sah dari perjuangan kemerdekaan oleh elit nasional Indonesia yang ingin mempertahankan perbedaan antara revolusi nasional, yaitu perjuangan menentang kolonialisme Belanda, dan revolusi sosial, yaitu perjuangan menentang struktur kekuasaan

“kedaulatan rakyat” ternyata merupakan pendorong utama bagi perubahan peranan itu.

Menurut T. Ibrahim Alfian, ada beberapa faktor yang menyebabkan kalahnya uleebalang dalam peristiwa revolusi sosial di Aceh. Faktor pertama, perpecahan antara kelompok elit Uleebalang hanya terbatas hanya pada beberapa uleebalang yang mempunyai ikatan solidaritas dengan Teuku Muhammad Daud Cumbok. Faktor kedua, kepiawaian dan kepintaran golongan ulama menggunakan simbol-simbol keagamaan dan kemerdekaan dalam rangka menarik perhatian dan pengaruh dari sebagian besar rakyat Aceh. Faktor ketiga, keberhasilan para ulama mempengaruhi kerisidenan Aceh dan media massa. Media komunikasi yang terdapat di Aceh *Semangat Merdeka* sangat aktif mempengaruhi pendapat umum mengenai gerakan ini.⁵³

⁵³ T. Ibrahim Alfian, *Revolusi Kemerdekaan*, hal. 75-76.

BAB IV

PEMERINTAHAN DALAM KENDALI ULAMA

A. Pembentukan Majelis Penimbang

Setelah selesainya revolusi sosial, problema selanjutnya adalah bagaimana mengatur harta peninggalan pihak uleebalang yang telah dikalahkan dan tidak terjamin keselamatan jiwamereka. Adanya usaha-usaha dari anasir-anasir yang tidak berhak untuk mengambil harta peninggalan uleebalang, penganiayaan-penganiayaan terhadap famili mereka, bukan tidak mustahil akan menyebabkan meletusnya perang saudara kembali. Sehubungan dengan harta peninggalan uleebalang, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Badan Pekerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, pada tanggal 24 Juni 1946 telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 1/1946, yaitu: "Peraturan tentang Menguasai atau Memiliki harta benda peninggalan uleebalang-uleebalang Daerah Aceh".¹

Dalam peraturan tersebut dikemukakan, penyelesaian pemerintah untuk membentuk Majelis Penimbang dengan susunan pengurus: sebagai ketua I, II, III, IV, V dan VI, masing-masing ditunjuk Tengku Abdul Wahab Seulimeum (Bupati Pidie), M. Husein, Tengku Haji Mustafa Ali, Hasan Ali, T. Mohammad Amin dan Tengku Ham Peureulak, sedangkan Panitera Umum ditunjuk Tengku Nyak Umar.²

¹ H.T.M. Amin, *Susunan Pemerintah Republik Indonesia Di Aceh*, (Banda Aceh, Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Banda Aceh, 1976), hal. 5-6.

² T. Ibrahim Alfian, *Revolusi Kemerdekaan Indonesia Di Aceh (1945-1949)*, (Banda Aceh: Depdikbud, 1982), hal. 81.

Menurut van Dijk, latar belakang dibentuknya Majelis Penimbang ini adalah adanya penyitaan terhadap harta uleebalang yang sebagian besar diberikan kepada ulama. Ulama juga menuntut kedudukan yang paling menguntungkan dalam ekonomi untuk mereka sendiri. Misalnya Said Abdullah menjadi manajer perkebunan asing atau yang dimiliki oleh pemerintah, sedangkan Amir Husin al-Mujahid dihadiahi jabatan direktur ternama perusahaan Sumatera Utara, dan seorang pemimpin PUSA lain, Nyak Neh, menguasai perdagangan.³

Gejala-gejala tersebut menimbulkan banyaknya perlawanan tidak hanya dari kerabat uleebalang yang meninggal dunia, yang harta miliknya disita, melainkan juga di pihak rakyat jelata dan ulama-ulama Islam tradisional yang tidak masuk dalam kategori ulama PUSA. Misalnya Tengku. Hasan Krueng Kale dan Tengku Hasbullah Indrapuri, mengutuk pengambilan harta kekayaan uleebalang dan menyatakan hukumnya haram. Untuk meredakan kecemasan-kecemasan terhadap pembagian kekuasaan dan harta benda, pemerintah daerah Aceh membentuk Majelis Penimbang di setiap Kabupaten.⁴

Majlis ini diserahi tugas mengurus semua bekas barang milik sang uleebalang almarhum. Dari hasil pendapatan ini diharapkan agar kerugian yang ditimbulkan oleh uleebalang pada masa lalu maupun dalam bulan-bulan dekat sebelum dan sesudah revolusi sosial dapat terganti. Barang-barang yang dibeli Uleebalang dengan harga rendah yang tidak wajar, diberi kesempatan

³ Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta: Grafiti, 1993). hal. 267.

⁴ *Ibid.*

kepada pemliknya untuk membeli kembali barang-barang itu menurut harga yang diterima semula. Sisanya, dibagi antara ahli waris uleebalang almarhum.

Pembentukan Majelis Penimbang pada Juli 1946 mendapat tantangan seperti di atas karena keanggotaannya terdiri hampir seluruhnya dari ulama. Juga, anggota tidak berhasil melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Kegagalan ini juga diakui oleh anggotanya sendiri. Ada beberapa faktor mereka kemukakan sebagai alasan, umpamanya, perang melawan Belanda dan kenyataan bahwa dalam pendaftaran harta milik uleebalang, mereka sulit melakukan rekonstruksi barang-barang yang berhak disita.⁵

B. Pelepasan Hak-hak Uleebalang

Sehubungan dengan gangguan atau penganiayaan terhadap famili atau yang dituduh sebagai sisa-sisa pengikut markas uleebalang, dalam rangka menjamin keselamatan, pemerintah mengeluarkan sebuah ketetapan tertanggal 13 Agustus 1946, No. 59/NRI. Dalam ketetapan itu disebutkan tempat tinggal khusus bagi uleebalang, dan kepada mereka diberikan sokongan sebesar Rp 100 (seratus rupiah) per bulan ditambah dengan jatah beras kepada pegawai negeri waktu itu. Adapun tempat pembuangan itu adalah di desa Sadong, di desa ini dibuang Teuku Nyak Arief bekas Residen Aceh.⁶ Bersama Teuku Nyak Arief ikut Syamaun Gaharu dan Teuku Hamis Azwar dalam pembuangan ini.

⁵ *Ibid.*, hal. 268.

⁶ Teuku Nyak Arief diangkat sebagai Residen pertama Aceh pada tanggal 29 September 1945, dalam pembuangan Teuku Nyak Arief meninggal dunia.

Jabatan Teuku Nyak Arief sebagai Residen Aceh diambil alih Teuku Mohammad Daudsjah juga seorang uleebalang, tetapi sudah lama menjadi anggota PUSA yang setia. Seorang uleebalang lain anggota PUSA, Teuku Mohammad Amin, diangkat menjadi wakil residen. Tengku Daud Beureueh sebelum diangkat menjadi Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Karo juga mendapat kehormatan untuk duduk sebagai wakil Residen Aceh di samping juga menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Agama di Aceh. Amir Husin al-Mujahid yang mengangkat dirinya sendiri dari pangkat mayor menjadi mayor jendral menjadi staf umum tentara Republik Indonesia di Sumatera, Husin Jusuf, bekas sekretaris pemuda PUSA, diangkat dari jabatan mayor menjadi kolonel dan menggantikan Syamaun Gaharu sebagai panglima divisi V. Perubahan-perubahan ini dilakukan atas kehendak rakyat yang diwakili Tentara Perjuangan Rakyat.⁷

Demikianlah, perubahan-perubahan terhadap status dan kekuasaan uleebalang diambil alih ulama lewat kekuatan PUSA mendominasi pemerintahan. Seperti uleebalang Sagi Mukim XXII menyatakan pada tanggal 10 Februari 1946 sebagai berikut:

1. Hak uleebalang turun-temurun menggantikan pemimpin negeri tidak lagi sesuai dengan konteks zaman kini,
2. Uleebalang adalah warga republik dan menghormati kesejahteraan rakyat; dan

⁷Ibid, hal. 266.

3. Mereka telah memutuskan, demi tercapainya organisasi yang sempurna. a) memohon kepada pemerintah dengan hormat agar memberikan kepada penduduk kedua puluh dua mukim hak untuk memilih pemimpin-pemimpinnya sendiri, dan b) meminta agar semua uleebalang, termasuk kepala Sagi, untuk mengundurkan diri dari jabatannya.⁸

Inilah hasil revolusi yang banyak mengecewakan kaum uleebalang, di samping ada uleebalang yang terusir dari kampung halamannya, disita hartanya, dicabut hak-haknya dan lain-lain. Tentu perasaan tersebut memunculkan kekecewaan terhadap kaum ulama, perlawanan terus diupayakan.

C. Oposisi Terhadap Ulama

Ketidakpuasan terhadap kendali ulama dalam pemerintahan secara terang-terangan diperlihatkan oleh kelompok Said Ali dan kawan-kawan, komplotan ini dalam sejarah dikenal dengan gerakan Said Ali Cs. Mereka Said Ali Al-Saqqaf, Tengku Muh. Asyik, Muhammad Meraxa (Aceh Besar), Tengku H. Muhsin, Nyak Sabi dan T. Syamanu Latif (Pidie). Kelompok ini kecewa karena tindakan PUSA dalam peristiwa revolusi sosial di Aceh. Tujuan gerakan dituangkan dalam suatu program yang dinamakan "*Programma van actie*" yang berbunyi sebagai berikut:

⁸ *Ibid.*

1. Menggantikan segala pegawai yang tidak cakap
2. Memberhentikan semua pegawai yang nyata-nyata melakukan korupsi.
3. Memberhentikan semua pegawai yang nyata-nyata melakukan korupsi.
4. Memberhentikan semua pegawai yang tidak konsekwen
5. Agar pemerintah benar-benar melindungi jiwa dan harta rakyat. Sebagai bukti pemerintah harus mengembalikan harta anak yatim yang sekarang masih disimpan dalam Majlis Penimbang, dan supaya pemerintah menjelaskan kesalahan yang dilakukan di luar pertempuran oleh orang-orang PUSA.
6. Membubarkan panitia pemilihan umum di daerah Aceh dan menggantikannya dengan yang baru.
7. Menggantikan pemerintahan sipil dengan pemerintahan militer.¹²

Pada awal Agustus Said Ali dan rekan-rekannya ditangkap dan dituntut karena memfitnah para pejabat senior pemerintah daerah. Beberapa hari kemudian, sesudah mereka dibebaskan, mereka melaksanakan upaya pertama untuk kudeta. Barangkali gerakan ini membayangkan revolusi Desember 1945 atau awal Januari 1946, balas dendam merupakan motif yang dapat dicermati dalam gerakan ini. Hal tersebut yang dapat dilihat dalam tuntutan-tuntutan mereka.

¹² *Ibid*, hal 134.

Said Ali dan rekan-rekan melanjutkan perlawanan kedua mereka pada tanggal 4 November 1948. Perbuatan Said Ali ini digolongkan dalam kategori perbuatan sisa-sisa uleebalang. Mereka akhirnya dibuang dari Aceh.

D. Respon Pemerintah Pusat

Seperti revolusi-revolusi sosial lainnya di daerah-daerah Indonesia waktu itu, pemerintah pusat bisa dikatakan tidak mampu menghadapi bahkan menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah. Pemerintah pusat membiarkan atau untuk sementara terpaksa mendukung pergolakan internal daerah dengan alasan pembabatan sisa-sisa feodal. Bagi pemerintah pusat gerakan-gerakan daerah menambah persoalan dalam menghadapi dunia luar, di Pekalongan Syahrir, Soekarno, dan Hatta mengeluh karena mereka berpendapat bahwa menghadapi Pekalongan lebih sulit daripada menghadapi dunia luar. Presiden secara ketus mengatakan bahwa gerakan tersebut merupakan gerakan “Negara Tolong” yang memberi kesan baginya bahwa gerakan revolusi sosial adalah gerakan separatis. Persoalan pengakuan kemerdekaan dari dunia luar lebih diutamakan, pada sisi lain pemerintah RI juga harus menunjukkan kepada sekutu khususnya Inggris dan Amerika Serikat bahwa RI mampu memerintah seluruh Kepulauan Nusantara.¹³ Di Aceh kaum ulama sebagai pemenang dalam revolusi, kekuatannya bertambah tangguh ketika Aksi Militer Belanda pada akhir Juli 1947.

¹³ R.Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*. (Jakarta: Grafiti, 1990), hal. 16-17.

Aksi militer Belanda itu justru memperkuat posisi pemimpin PUSA, Tengku Daud Beureueh. Kemampuan ulama menghancurkan lawan-lawannya tanpa campur tangan pemerintah pusat memperlihatkan derajat otonomi daerah sepanjang masa revolusi. Tentu saja pemerintah pusat cukup mengetahui apa yang sedang terjadi di daerah tersebut, tetapi pemerintah pusat tidak memiliki pilihan selain membiarkan saja penguasa setempat untuk mengatasi sendiri masalah mereka.

Dibiarkan tidak terganggu oleh Pemerintah Pusat, Daud Beureueh bukan saja dapat menghancurkan Gerakan Said Ali dan kegiatan para pemimpin kiri yang terus berlanjut, tetapi juga mampu mengerahkan rakyat untuk menghadapi Aksi Militer Belanda yang kedua pada pertengahan Desember 1948. Perlawanan terhadap Belanda tampaknya tidak terpengaruh oleh gejolak politik intern. Perselisihan antara kaum reformis PUSA dan ulama tradisional dalam masalah politik sama sekali tidak menyebabkan ulama tradisional itu tidak mendukung Gubernur Militer dalam perjuangan menentang Belanda. Kedua kelompok ulama ini telah lebih dahulu sepakat untuk mengumumkan bahwa perjuangan merebut kemerdekaan dari Belanda adalah, wajib bagi umat Islam,¹⁴ sehingga mereka mengubah revolusi menjadi sebuah perjuangan keagamaan. Oleh sebab itu para ulama tidak sukar memperoleh dukungan rakyat untuk revolusi. Sudah sejak Perang Aceh, rakyat Aceh telah memandang Belanda sebagai *kaphee* (kafir), sehingga mereka mudah menerima interpretasi perlawanan terhadap Belanda sebagai suatu perjuangan agama.

¹⁴ "Makloemat Oelama Seloeroeh Atjeh", pamflet, bertanggal Kutaraja, 15 Oktober 1945.

Akan tetapi, dukungan kaum ulama untuk Republik sangat banyak ditentukan oleh harapan mereka tentang masa depan dasar negara Indonesia yang sama sekali belum jelas bagi mereka. Mereka berpendapat bahwa jikalau negara tidak didasarkan pada hukum Islam, maka mereka tidak dapat memperjuangkannya, sebab perjuangan tersebut bukan merupakan suatu perjuangan agama, sehingga korban yang jatuh akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, dalam suatu pertemuan dengan Soekarno di Kutaraja pada tahun 1948, baik ulama tradisional maupun reformis telah mempersoalkan dasar negara ini kelak, di samping mendesak Presiden agar menerapkan hukum Islam secara luas. Dalam jawabannya, Presiden hanya menunjuk pada Piagam Jakarta yang menjamin pelaksanaan syariat Islam terhadap semua umat Islam di Indonesia, dan berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan Aceh sebagai daerah Islam.¹⁵ Jawaban ini tidak memuaskan para ulama. Hanya setelah Soekarno menegaskan kembali bahwa Indonesia akan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam barulah mereka menyatakan kesediaan mereka untuk mendukung Republik.

Apa yang menyebabkan Pemerintah Pusat tunduk pada rakyat Aceh dan membiarkan mereka memiliki otonomi yang demikian besar? Barangkali jawaban terhadap pertanyaan ini terletak pada fakta bahwa Pemerintah Pusat tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan kontrol yang nyata di daerah itu dalam situasi 1945-1949, sementara rakyat Aceh benar-benar bebas dari pengaruh Belanda. Kenyataan bahwa Aceh luput dari pendudukan Belanda

¹⁵ Kronik Kementerian Penerangan, 20 (1954), hal. 79-80.

dalam dua Aksi Militer pada tahun 1947 dan 1948, sementara daerah lain termasuk ibu kota Republik telah dikuasai Belanda, merupakan modal penting bagi pemimpin-pemimpin Republik. Dengan demikian dapatlah ditunjukkan kepada dunia bahwa Republik masih ada. Di pihak lain, karena bebas dari tekanan Belanda, Aceh menjadi markas operasi militer Republik di Sumatra, selain berfungsi sebagai sumber keuangan yang penting bagi Pemerintah Pusat, terutama untuk kegiatan-kegiatan di luar negeri. Berbagai kegiatan Republik di luar negeri itu dibiayai oleh perdagangan antara Aceh dan Malaya, meski ada blokade Belanda, dan melalui penjualan obligasi nasional yang sangat berhasil di Aceh, di samping dibiayai dengan harta yang disita dari para *Uleebalang*.

Otonomi Aceh juga melayani kepentingan Pemerintah Pusat pada masa revolusi, karena Aceh selalu memperlihatkan loyalitas kepada pemerintah dengan dukungan dalam setiap peristiwa. Jadi, rakyat Aceh tidak hanya menolak Persatuan Perjuangan,¹⁶ ketika mereka berusaha menggagalkan perundingan antara Republik dan Belanda, tetapi juga menolak menghadiri konferensi para pemimpin seluruh Sumatera yang disponsori Belanda untuk mendirikan Negara Sumatera pada awal tahun 1948. Sehubungan dengan kesetiaan ini, adalah menjadi kepentingan Pemerintah Pusat untuk mempertahankan kekuatan politik Aceh yang kuat dan bersatu, tanpa mempersoalkan siapa yang menguasai. Dengan demikian, Pemerintah Pusat terpaksa mengizinkan pemimpin-pemimpin setempat untuk mengatasi masalah mereka dengan cara mereka sendiri. Dalam hal ini, dan karena ketidakhadiran

¹⁶Osman Raliby, *Documenta Historica* (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), hal. 223.

Belanda di Aceh, Pemerintah Pusat bebas dari segala kekhawatiran tentang kemungkinan bahwa lawan-lawan PUSA akan bekerja sama dengan Belanda.

E. Jatuhnya Kekuasaan Ulama

Selama revolusi, Belanda memang tidak membangun kembali kekuasaannya di Aceh, kecuali di pulau Sabang yang jauh dari Aceh Besar. Pimpinan Pusat Republik yang terkepung, jauh di pulau Jawa, tidak dapat memberi hadiah ataupun sanksi untuk mempengaruhi keadaan di Aceh. Akan tetapi karena penguasa Republik menyandarkan sepenuhnya kepada bujukan moral, maka pimpinan pusat itu populer sekali dan diterima oleh Aceh. Menyusul agresi militer pertama Belanda terhadap Republik pada bulan Juli 1947, pemerintah pusat mengangkat Teungku M. Daud Beureueh sebagai Gubernur militer Aceh. Komitmen Daud Beureueh kepada Republik tetap tak tergoyahkan, sebagaimana terlihat dalam tanggapannya kepada sebuah usul pada awal 1949 yang memungkinkan Aceh dapat membentuk pemerintahan sendiri di dalam suatu sistem negara federal yang di dukung oleh Belanda. Eric Moris secara tegas menyatakan:

Tidak ada perasaan kedaerahan di Aceh; jadi Aceh tidak mempunyai niat untuk mendirikan Negera Aceh Besar karena Aceh berjiwa Republikan...

Kesetiaan rakyat kepada Republik Indonesia tidak berpura-pura dan tidak pula dibikin-bikin, tetapi tulus dan ikhlas, yang timbul dari komitmen yang sejati yang dirasakan dalam hati dan dari perhitungan dan pertimbangan yang kuat. Rakyat Aceh yakin bahwa kemerdekaan sendiri-sendiri, daerah demi daerah, negara-demi negara tidak akan pernah dapat mencapai kemerdekaan yang abadi.¹⁷

¹⁷ Eric Morris, "Aceh: Revolusi Sosial dan Pandangan Islam" dalam Kahin, *Pergolakan Daerah*, hal. 107.

Karena Belanda tidak berusaha memasuki Aceh, Para pedagang Aceh dapat terus melakukan perdagangan *barter* yang menguntungkan melalui selat Malaka dengan Penang dan Singapura. Pada mulanya, perdagangan itu tidak di rintangi karena Belanda belum dapat menguasai lalu lintas di selat itu. Menjelang tahun 1947, Belanda mengadakan blokade laut yang membahayakan pelayaran, tetapi hal itu tidak begitu menggertakan hati Para pedagang Aceh. Ekspor komoditi yang paling penting adalah karet dan minyak kelapa sawit, mula-mula dari cadangan yang ditinggalkan oleh penguasa Jepang dan kemudian dari perkebunan-perkebunan di Aceh Timur. Kopra dan buah Pinang dari pemilik-pemilik kecil juga tinggi harganya di Malaya. Perdagangan ini, sebagaimana halnya dengan aparat administrasi dan pasukan-pasukan militer berada di bawah pengawasan keras PUSA. Anggota-anggota PUSA diangkat untuk memimpin berbagai perusahaan dagang yang dibiayai oleh pemerintah keresidenan tetapi tidak semua pendapatan eksor ini digunakan untuk Aceh; karena itu orang-orang Aceh melukiskan daerah mereka sebagai "daerah modal". Para pedagang Aceh menyumbangkan sebagian dari keuntungan mereka untuk membantu perutusan Republik ke luar negeri, dan pada tahun 1948, memberi devisa untuk membeli dua pesawat terbang.¹⁸

Pemerintah daerah Aceh pada masa setelah revolusi sosial berjalan dengan otonomi yang hampir penuh. Para pemimpin PUSA dengan demikian mendapat kesempatan untuk mengambil beberapa langkah permulaan sesuai

¹⁸ *Ibid.*, hal. 32-42.

dengan apa yang mereka anggap sebagai keharusan dalam Islam. Langkah-langkah ini kelak setelah revolusi usai akan menjadi masalah yang kontroversial antara Aceh dan pemerintah pusat. Persoalan yang lebih besar ketimbang prakarsa kebijaksanaan mana pun juga adalah sikap yang mendasari ulama Aceh; mereka mengira mereka akan memberikan sumbangan kepada perdebatan mengenai ideologi nasional, dengan menunjukkan apa yang mereka yakini harus menjadi dasar bagi negara Indonesia setelah berakhirnya masa revolusi. Selama revolusi, Teungku Nur el Ibrahimy, seorang ulama PUSA terkenal, mengajukan alasan utama bagi "suatu negara yang berdasarkan ideologi Islam". Menjawab mereka yang berpendapat bahwa Islam merupakan masalah pribadi, di luar kawasan politik, ia menegaskan bahwa;

Dalam Al-Qur'anul Karim kita mendapatkan bukti yang banyak sekali bahwa Islam tidak hanya memberikan bimbingan kepada umat manusia dalam persoalan keilahian dan kewajiban-kewajiban agama, tetapi juga memberikan bimbingan dalam masalah-masalah sosial, sehingga umat manusia benar-benar dapat mencapai kemakmuran dan kebahagiaan dalam hidup ini dan juga alam baka

Janganlah mengira bahwa semua hukum-hukum ini hanya cocok untuk abad unta, karena hukum-hukum tersebut juga cocok untuk abad modern, abad pesawat terbang, abad radio, atom; lagi pula hukum-hukum tersebut cocok untuk masa depan yang belum terbayang oleh umat manusia.¹⁹

Daya tarik yang begitu kuat dari negara yang berdasarkan Islam itu harus dilihat dari sudut keinginan yang mendesak untuk melepaskan diri dari kehinaan dijajah. Bagi ulama Aceh yang pada tahun 1930-an dengan tegas menghubungkan tujuan pembaharuan Islam dengan pembaharuan kembali sejarah masyarakat, maka perjuangan harus memerlukan konsep negara Islam:

¹⁹ Tengku M. Nur El Ibrahimy, "Islam Dan Politik", *Kebanggaan Islam*, (Banda Aceh: 1948) hal. 51-52

mengenai sifat manusia oleh Muslim tidak dianggap sebagai suatu pertentangan melainkan sebagai suatu ketegangan yang utama dalam kepercayaan Islam.

Ketegangan ini penting sekali untuk memahami yang ada dalam pikiran para ulama Aceh kalau mereka berbicara mengenai sebuah negara yang berdasarkan Islam. Menurut mereka negara harus menaruh perhatian besar pada kegeangan ini, dan menetapkan serta memajukan ajaran-ajaran agama yang memberi motivasi kepada para pemeluknya gara berbuat menurut prinsip yang lebih tinggi dari pada kepentingan sendiri. Selanjutnya, sebuah negara Islam harus mengasuh dan melindungi masyarakat dengan kesadaran bersama bahwa keadilan dan kebenaran hanya dapat terwujud melalui penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan hukum-hukum-Nya. Bagaimana bentuk kelembagaan negara seperti itu akan tetap tidak jelas, dan sampai tingkat tertentu tidak relevan. Pertanyaan yang mendesak bagi para penganjur negara Islam bukanlah mengenai lembaga-lembaga itu melainkan tentang bagaimana kekuasaan atau wewenang pemerintah dapat digunakan untuk menciptakan dan mempertahankan masyarakat beriman yang bersatu dan selaras. Kalau para penganjur berbicara mengenai sebuah negara Islam, mereka biasanya sedikit sekali mengatakan tentang negara itu sebagaimana adanya; yang penting bagi mereka sebenarnya ialah kualitas masyarakat, dan negara hanya menjadi pemikiran mereka yang sepanjang ia berguna bagi tujuan untuk mencapai masyarakat yang diidam-idamkan.

Walaupun ulama PUSA selama revolusi tidak secara terang-terangan mendesakkan klaimnya tentang negara Islam kepada pimpinan pusat Republik yang terkepung itu hal ini akan terjadi begitu Republik menang - meskipun demikian mereka bermaksud untuk memberi ciri Islam yang khusus kepada revolusi di Aceh.

Para ulama melihat adanya hubungan yang erat antara kejujuran moral dan kesalehan di satu pihak, dan kesadaran bermasyarakat dan kesadaran berguna bagi semua di pihak lain. Dalam upayanya untuk meningkatkan moral masyarakat, Gubernur Militer mengumumkan bahwa mereka yang dianggap bersalah melakukan perjudian, perzinahan, atau pencurian, baik dikenakan tuduhan secara resmi atau tidak, baik dibebaskan dari tuduhan atau tidak - bahkan mereka yang hanya diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut - dapat diasingkan demi kepentingan keamanan umum. Pengabaian syarat-syarat pembuktian seperti itu dengan sendirinya membuat marah para ahli hukum didikan Belanda. Reaksi negatif ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Kata seorang pemimpin PUSA, "kami menghapuskan perjudian dan sebangsanya, tetapi dikatakan tidak mempunyai wewenang hukum untuk berbuat demikian. Rupanya kami tidak dapat melaksanakan cita-cita kami itu karena Pusat tetap menginginkan agar kami mematuhi hukum Belanda".²⁰

Usaha untuk menegakkan kejujuran moral diperluas melalui upacara-upacara keagamaan juga. Pada tahun 1948. Jawatan Urusan Agama

²⁰ Ibid, hal. 58.

Karesidenan bersama-sama dengan "para ulama seluruh Aceh" mengeluarkan sebuah keputusan bersama yang melarang menjalankan berbagai praktek kepercayaan tradisional yang dianggap sebagai tambahan setempat dan haram menurut ajaran Islam yang murni. Larangan ini mencakup seluruh upacara yang rumit yang berkaitan dengan kematian keselamatan yang diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu setelah penguburan seorang sanak-keluarga, melakukan zikir dan lain-lain usaha permohonan kepada Tuhan atas nama arwah yang sudah meninggal. Selain itu, kaum reformis melarang kebiasaan-kebiasaan orang-orang Aceh untuk memuja orang-orang suci seperti pesta-pesta dan membaca Al-Qur'an serta memuja makam ulama tersohor yang rahmat dan berkahnya diminta untuk mengabulkan suatu keinginan atau menyembuhkan suatu penyakit.

Meskipun yang dimaksud oleh ulama PUSA bukanlah terutama tentang lembaga-lembaganya apabila mereka berbicara tentang penerapan hukum Islam, namun mereka mau memperkokoh pembaruan-pembaruan di bidang peradilan yang diadakan di masa pendudukan Jepang. Pada bulan Agustus 1946, pemerintah karesidenan secara resmi membentuk pengadilan Islam di beberapa tingkat pemerintahan dan sebuah pengadilan banding di Kutaraja, tanpa otoritas pemerintah pusat. Pada bulan Januari 1947, Gubernur Sumatra memberi instruksi kepada semua residen di seluruh Sumatra untuk membentuk pengadilan-pengadilan agama, sebagian guna memenuhi permintaan adanya pengadilan Islam di daerah Sumatra lainnya yang berbeda dengan di Aceh, karena persoalan pengadilan agama tidak dipisahkan oleh penguasa Jepang dari

pengadilan-pengadilan adat, dan sebagian lagi untuk menguasai, apa yang menurut Daniel LeV. "apa yang tampaknya sebagai suatu keadaan yang acak-acakan di Aceh".

Sejak adanya keadaan Islam di Aceh, para pemimpin setempat lebih suka menafsirkan instruksi gubernur itu sebagai perluasan wewenang bagi pengadilan-pengadilan itu. Sejak mulanya, pengadilan Islam mempunyai yuridiksi atas persoalan-persoalan keluarga yang dipandang sebagai kepentingan tradisional pengadilan-pengadilan agama. Yang lebih menjadikan permasalahan lagi berkenaan dengan wewenang pengadilan adalah pokok persoalan tentang warisan dan perwalian. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh memutuskan bahwa warisan tegas-tegas menjadi wewenang pengadilan Islam dan menolak hak pengadilan sipil (negeri) untuk memeriksa perkara warisan.

Prakarsa pengadilan ini kemudian menjadi pokok persoalan perdebatan antara pusat dan Aceh, yang mencerminkan masalah yang lebih besar, yaitu mengenai apakah pemerintah pusat pasca-revolusi mengakui adanya pemerintah Republik yang sah selama revolusi di Aceh. Baru sepuluh tahun kemudian pemerintah pusat menetapkan bahwa instruksi gubernur pada bulan Januari 1947 mengenai pembentukan pengadilan-pengadilan Islam di Sumatra merupakan tindakan sah Republik. Penundaan pengesahan Instruksi gubernur

itu membuat ragu seluruh aparat hukum Islam di Sumatra dan, bagi pemimpin-pemimpin PUSA, merupakan pertanda yang menggelisahkan.²¹

Persoalan penting lainnya dalam agenda PUSA ialah masa depan madrasah. Bagi para pemimpin PUSA madrasah merupakan dasar perjuangan untuk memerdekakan. Pada tahun 1946, pemerintah keresidenan menetapkan bahwa madrasah adalah sekolah negeri yang memperoleh subsidi dari pemerintah dan para pengajarnya mendapat gaji dari pemerintah. Dapat diduga, langkah ini telah mendorong semakin banyaknya sekolah-sekolah agama. Menjelang akhir revolusi, pemerintah keresidenan membiayai lebih dari dua ratus madrasah. Meskipun ulama reformis menganggap pemberian dukungan kepada madrasah itu sebagai hal yang wajar, namun mereka pun menyadari kemungkinan banyaknya masalah yang akan timbul daripadanya. Kalau para pejabat pemerintah pusat mengunjungi Aceh, pertanyaan yang diajukan selalu apa yang harus dilakukan terhadap madrasah yang disubsidi oleh pemerintah. Sebab pemerintah daerah lain tidak ada yang mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab bagi pendidikan dasar Islam. Tetapi tidak ada ketetapan pemerintah pusat yang datang untuk mengatur apa yang dianggap oleh para pejabat departemen pendidikan sebagai suatu keadaan yang sangat luar biasa itu. Adanya komitmen yang kuat terhadap pendidikan dasar yang berlandaskan agama, dipadukan dengan kewaspadaan terhadap adanya kekuatan-kekuatan yang tidak menghendaki madrasah menjadi bagian dari pendidikan negeri, mendorong para pemimpin PUSA untuk mengajukan usul pengintegrasian

²¹Pembahasan atas masalah ini, lihat Soutjan Hamzah. "Kedudukan Pengadilan Agama di Sumatra." *Mimbar Indonesia* 39, (24 September 1955): 10-12.

madrasah dan sekolahsekolah desa. Hasilnya, tak ada penggabungan. Juga usaha-usaha selanjutnya untuk menggabungkan sekolah-sekolah dasar agama dan sekuler tidak berhasil, karena pemerintah pusat tidak bersedia mengizinkan adanya prakarsa setempat yang luar biasa semacam itu. Tetapi gagasan bahwa anak-anak Aceh harus mendapatkan pendidikan yang didasarkan pada model madrasah masih tetap ada. Selama revolusi, para pemimpin PUSA berhasil melembagakan madrasah sedemikian rupa sehingga tidak dapat begitu saja dibongkar oleh aparat pejabat departemen pendidikan pusat di Jakarta yang tidak menyukainya.

Menyusul agresi militer kedua Belanda terhadap Republik pada akhir Desember 1948, otonomi pimpinan Aceh bertambah, karena tentara Belanda menawan para pemimpin pusat Republik dan karena hubungan kubu pertahanan Republik di Sumatra dengan Jawa terputus. Pada bulan Juli 1949, perundingan-perundingan antara Indonesia-Belanda menghasilkan dibebaskannya para pemimpin tinggi Republik. Mengingat prospek yang tidak menentu bagi kelanjutan perundingan dengan Belanda, Presiden Sukarno lalu mengangkat Syafruddin Prawiranegara sebagai Wakil Perdana Menteri dan memberi kuasa untuk membuat peraturan-peraturan pemerintah bagi Sumatra, yang dapat ditinjau kembali oleh pemerintah pusat. Atas desakan para pemimpin Aceh, Syafruddin menggunakan kekuasaan luar biasanya ini untuk mengeluarkan keputusan pemerintah yang menjadikan Aceh untuk membentuk provinsi tersendiri. Ketetapan yang dikeluarkan dalam bulan Desember 1949 ini, terjadi hanya beberapa hari setelah penyerahan kedaulatan secara resmi dari

sebagai sebagian dari warisan revolusi bangsa yang sah dan bernilai. Salah satu akibat revolusi yang rupanya diperlukan bagi berhasilnya hubungan dengan pusat. Keahlian itu ialah penguasaan bahasa kolonial (Belanda) yang memungkinkan sama-sama merasakan apa yang dipikirkan oleh elite nasional itu. Karena mereka tidak menguasai bahasa kolonial dan tidak memiliki pengalaman yang sama dan pengertian yang terkandung di dalam bahasa tersebut, maka kaum sosial revolusioner Aceh pada masa pasca-revolusi tidak bisa melakukan pendekatan-pendekatan dengan enak dan efektif di Jakarta pasca-revolusi, di mana bahasa Belanda memegang peranan penting.

Lebih jauh, kaum revolusioner Aceh itu mulai berpikir tentang bagaimana menjadikan negara pasca-revolusi sebuah negara yang akan berlandaskan pada apa yang mereka anggap sebagai perintah Islam.

Akan tetapi, Indonesia tidak akan menjadi sebuah negara Islam. Karena putus asa dalam mencapai tujuan inilah, maka dalam tahun 1953 kaum revolusioner Aceh itu kembali ke pegunungan untuk mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah pusat yang mereka anggap sebagai pemerintah sekuler. Sepanjang waktu, orang-orang Aceh itu sangat berhati-hati untuk menganggap pemberontakan mereka sebagai bagian dari perjuangan Islam Indonesia. Mereka selalu menyatakan bahwa perjuangan mereka itu sendiri adalah peninggalan revolusi nasional.

BAB V

KESIMPULAN, SARAN-SARAN, PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan tulisan ini, penulis dapat menyimpulkan tiga hal:

1. Walaupun Belanda tidak lama menguasai Aceh, politik pasifikasinya dengan membenturkan kelompok stratifikasi sosial di Aceh telah menimbulkan kecemburuan politik dan gejala dalam masyarakat Aceh. Dalam masa Sultan Aceh kedudukan Ulama dan adat berhasil dipangku dalam rangkulan kerajaan dengan ungkapan sangat manis "*Adat bak Pameureuthoem, Hukum bak Syiah Kuala*", yang menandai akurnya dua komponen hukum masyarakat di Aceh. Belanda berhasil memecah belah dua kelompok tersebut dengan politik *divide et impera* yang menempatkan kaum Uleebalang dia atas segala struktur masyarakat Aceh. Berbeda dengan Belanda, Jepang merubah pola pendekatannya. Mereka mendekati kelompok ulama, yang menyebabkan kecemburuan politik kaum Uleebalang. Ulama dianggap oleh Uleebalang tidak ahli dalam bidang administrasi pemerintahan. Jepang juga menerapkan politik ganda terhadap dua kelompok ini yang akhirnya memunculkan benih-benih konflik baru sepeninggalnya Jepang.
2. Revolusi sosial Aceh adalah perebutan kekuasaan dari Uleebalang oleh kaum Ulama dengan memobilisasi massa. Ulama mendapat dukungan dari masyarakat dalam menghancurkan rezim Uleebalang. Sejarah telah mencatat bahwa kekerasan tidak dapat dihindari dalam peristiwa ini.

3. Dalam kendali ulama, pemerintahan dibangun atas dasar isu-isu moral dalam mengembangkan daerah modal sebagai basis Republik Indonesia. Ulama telah menunjukkan kesetiaan yang nyata terhadap republik, hal ini nyata terlihat dalam dekade 1945-1949. Dalam dekade ini Republik Indonesia masih menghadapi problem-problem berat, ulama telah mensponsori perjuangan rakyat Aceh untuk kepentingan nasionalismenya. Kesadaran untuk memerangi sisa-sisa pengkhianat negara, telah memunculkan barisan "sakit hati" terhadap kekuasaannya. Kegalauan ulama terhadap moralitas kepemimpinan pusat, rasa harga diri, perasaan otonomi dan derajat kemandiriannya untuk membangun Aceh menyebabkan munculnya ketegangan dengan pemerintah pusat. Ulama kembali ke hutan bersenandung jihad melawan kejahatan moral yang ditafsirkan secara sepihak oleh pusat bahwa mereka adalah pemberontak. Beralihnya kekuasaan kepada ulama tidak bisa dilepaskan dari latar perebutan kekuasaannya, kelanjutan dari perebutan kekuasaan ini akan terus berkepanjangan, intrik-intrik. Sisa-sisa dendam masa lalu secara turun temurun telah menyebabkan Aceh terperosok dalam jurang kehancuran. Peristiwa DI/TII, Gerakan Aceh Merdeka, kekerasan masa Orde Baru, kekacauan sosial adalah himpitan masa lalu yang bagaikan benang kusut yang sulit dicari ujung pangkalnya.

B. Saran-saran

Dalam penulisan ini, penulis menemukan tiga hal yang perlu dipikirkan bersama tiga hal tersebut adalah:

1. Komplektisitas kelompok dalam masyarakat memerlukan studi khusus mengenai topik ini. perbedaan pendapat yang sangat tajam antara Tengku Muh Daud Beureueh dengan Tengku Hasan Krueng Kale dan Tengku Hasan Lam jabat dua orang utama tradisional, memerlukan kajian selengkapnya tentang karakteristik ulama di Aceh. Begitu juga dengan polarisasi dalam tubuh Uleebalang, baik yang pro dan kontra. Penelusuran ini tentunya akan menambah bibliografi baru ke pustakaan tentang Aceh.
2. Bibliografi Aceh yang tersebar luas, perlu ditelusuri sisi-sisi komplektisitas pemahaman sumber, subjektifitas penulis karena faktor latar belakangnya memerlukan kajian baru tentang klasifikasi bibliografi Aceh, dalam hal penelusuran sejarah penulisannya, ungkapan tulisan tentang "*Historiografi Aceh*" merupakan kebutuhan mutlak dalam mengkaji Aceh secara komperhensif.
3. Dalam menyelesaikan problem Aceh, jalan terbaik saat ini adalah dengan melakukan dialog antar berbagai komponen masyarakat Aceh. Pemahaman sejarah benar tentang ke-Aceh-an akan membuat penyelesaian aceh secara damai dan utuh tereapai.

C. PENUTUP

Akhirnya sebagai pemula dalam menghasilkan karya ilmiah, Penulis menyadari masih banyak kekurangan, besar harapan kritik, masukan dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki tulisan ini agar dapat menghasilkan yang terbaik di masa-masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (ed.), *Agama Dan Perubahan Sosial*, Jakarta: C.V. Rajawali, 1986.
- Alfian, T. Ibrahim, *Revolusi Kemerdekaan Indonesia Di Aceh (1945-1949)*, Banda Aceh: Depdikbud, 1982.
- _____. *Perang di Jalan Allah, Aceh 1873-1912*, Yogyakarta: Disertasi UGM, 1981.
- Amin, H.T.M., *Susunan Pemerintah Republik Indonesia di Aceh*, Banda Aceh: Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Banda Aceh, 1976.
- Amin, S.M., *Kenang-Kenangan Dari Masa Lampau*, Jakarta: Pradya Paramita, 1978.
- Arief, *Bingkisan Kenang-Kenangan Konggres Besar PUSA Dan Pemuda PUSA, Tindjauan Sedjarah Pengesahan PUSA Di Atjeh*, Banda Aceh: Seksi Penerangan Panitia Konggres Besar Kutaraja 1950.
- Chaidar, *Aceh Bersimbah Darah*, Jakarta: Al-Kautsar, 1998.
- Dijk, Cornelis Van, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: PT. Grafiti, 1995.
- El-Ibrahimi, M.Nur, *Tengku Muhammad Daud Beureueh, Peranannya Dalam Pengolahan di Aceh*, Jakarta: Gunung Agung, 1986.
- Hussain, Abdullah, *Peristiwa*, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1965.
- Hussain, Abdullah, *Terjebak*, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1956.
- Jakobi, Tgk. A.K, *Aceh Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949 dan Peranan Teuku Hamid Anwar Sebagai Pejuang*, Jakarta: Gramedia, 1998.
- Jamil, M. Joenoes, *Riwayat Barisan "J"*, Banda Aceh: Pusat Pelatihan Ilmu-ilmu Sosial Aceh 1975.
- Ramadhan KH dan Jabbar, Hamid, Syamaun Gaham, *Cuplikan Perjuangan Daerah Modal, Outobiografi*. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

DAFTAR RALAT

No.	Halaman/Baris ke	Tertulis	Seharusnya
1.	1/baris footnote ke-6	dalam pengertian umara A.K. Jakobi	dalam pengertian A.K. Jakobi
2.	19/baris footnote ke-6	<i>Studi dan Masalah Kenegaran</i>	<i>Islam dan Masalah Kenegaraan</i>
3.	20/baris footnote ke-3	Muhammad Ibrahim, <i>Pemerintahan, dst.,</i> Departemen, dst., (Jakarta: 1985)	Muhammad Ibrahim, <i>Pemerintahan, dst...</i> (Jakarta: P & K, 1985)
4.	21/baris keempat	barat	Barat
5.	21/baris ke-20	sekunder	sekuler
6.	23/baris ke-9	menangkap gejala suatu gejala	menangkap gejala luar biasa
7.	26/baris ke-11	Peurelok	Peureulak
8.	28/baris ke-18	perataan	penataan
9.	33/baris ke-22	pera	para
10.	47/baris ke-17	a.l.	antara lain
11.	52/baris ke-12	walupun	walaupun
12.	55/baris footnote ke-5	penulisan	penulis
13.	78/baris ke-14	“Negara Tolong”	“Negara Talang”

BIODATA PENULIS

- Nama : Safari Daud
- Tempat/Tanggal Lahir: Beureunun, 1 Agustus 1975
- Nama Ayah : M. Daud Ali
- Nama Ibu : Zainabun
- Pendidikan : 1. MIN Jeuram (1983-1987)
2. Pesantren Darul Falah Jeuram (1985-1987)
3. SDN Bengga (1987-1988)
4. MTsN Jeuram (1989-1991)
5. Pesantren MTs. Terpadu Jeuram (1990-1991)
6. MAPK Banda Aceh (1991-1994)
7. Bahasa dan Sastra Arab
IAIN Sunan Kalijaga (1994-1997)
8. Sejarah Peradaban Islam
IAIN Sunan Kalijaga (1997-2001)
- Pengalaman Organisasi: 1. Ketua PHBI MIN Jeuram (1987)
2. Wakil Ketua OSIS MTsN Jeuram (1989-1990)
3. Koordinator Kaderisasi Pelajar
Islam Indonesia (PII) Ranting
MAN Banda Aceh (1992-1994)
4. Koordinator Kaderisasi PMII
Rayon Fak. Adab IAIN
Sunan Kalijaga (1994-1995)
5. Pemimpin Umum Majalah
Literasia Fak. Adab IAIN
Sunan Kalijaga (1995)
6. Anggota Kaderisasi PMII
Komisariat IAIN Sunan Kalijaga (1996-1997)
7. Sekretaris PMII Cabang Daerah
Istimewa Yogyakarta (1999-2001)

8. Sekjend Senat Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga (1999-2001)
 9. Anggota Senat IAIN Sunan Kalijaga Perwakilan Mahasiswa (2001-sekarang)
 10. Koordinator Seksi Agama Taman Pelajar Atjeh (TPA) Dacrah Istimewa Aceh Yogyakarta (1997-1998)
 11. Ketua PHBI Masjid IAIN Sunan Kalijaga (1997-1999)
 12. Direktur Taman Pengajian dan Pengabdian Anak (TP2A) Masjid IAIN Sunan Kalijaga (1998-1999)
 13. Ketua Forum Kajian Masyarakat (FKM) Lintas Lembaga Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga (1999-2000)
- Prestasi:
1. Juara I Pidato antar Siswa MIN Jeuram (1987)
 2. Juara II Pidato antar Santri Pesantren Darul Falah (1987)
 3. Juara I Pidato antar Siswa MTsN Jeuram (1989)
 4. Juara II Cerdas Cermat antar SLTP Kecamatan Seunagan (1990)
 5. Juara I Pidato antar Santri Pesantren Dua Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Selatan (1990)
 6. Pimpinan Sidang Temu Karya Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam Se-Indonesia di Salatiga (2000)
 7. Peserta Lokakarya Nasional Lembaga Legislatif Mahasiswa PTAIN-PTAIS se-Indonesia di Bandung (2000)
 8. Pemenang I Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKT1) Nasional Departemen Agama RI (2001)

- Pengalaman Kerja:
1. Tutor/Ustadz (Guru Ngaji) PTMAQ SPA
Yogyakarta (1994)
 2. Staf Pengajar Bahasa Arab BALATSA
SPA Yogyakarta (1994)
 3. Koordinator Guru Ngaji TP2A Masjid
IAIN Sunan Kalijaga (1997-1999)
 4. Guru Honorer MAN Lab. Fak. Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga (2001)